



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN



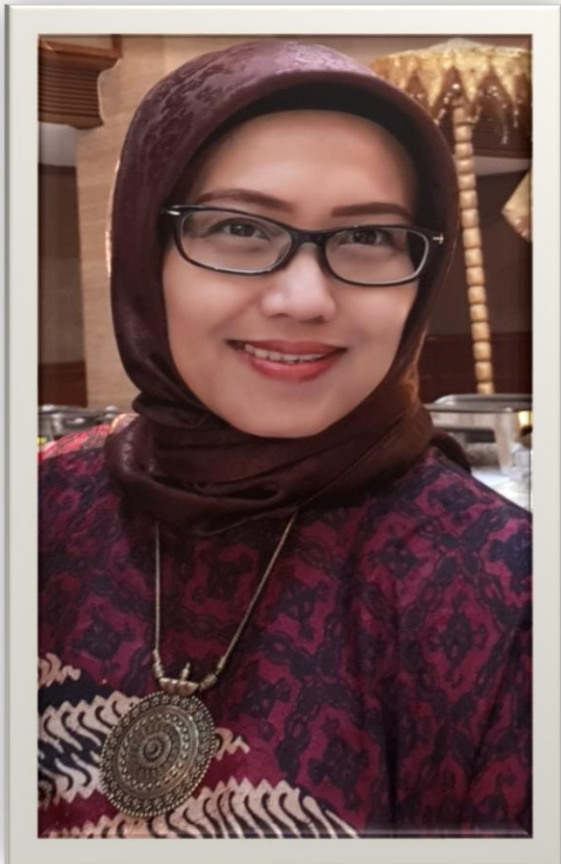
2020

LAPORAN TAHUNAN 2020



PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2020

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya PRKOM dapat menyelesaikan kegiatan tahun 2020 dengan baik yang terangkum dalam bentuk Laporan Tahunan yang disusun setiap tahun.

Keberhasilan PRKOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Pimpinan BPOM, serta pendampingan dari tim ahli dan kontribusi yang besar dari seluruh staf PRKOM.

Dalam buku ini disampaikan hasil kegiatan riset dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan selama tahun 2020 yang mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan PRKOM di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi pengawasan Obat dan Makanan di BPOM.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eka Purnamasari'.

Dra. Eka Purnamasari, Apt.,MKM

RINGKASAN

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) merupakan unit organisasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan.


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas BPOM, PRKOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Laporan Tahunan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) ini berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

PRKOM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan berkomitmen menjadi institusi riset yang inovatif dan kredibel melalui penerapan *Quality Management System* (QMS) dan secara berkesinambungan. PRKOM meningkatkan kemampuannya dengan melakukan audit internal secara berkala, kaji ulang dokumen, dan *continuous improvement* melalui tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Tahun 2020 telah dilakukan audit surveilans QMS berdasarkan ISO 9001:2015 (audit eksternal) oleh TUV Rheinland. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi BPOM serta penerapan sistem mutu dan peraturan perundangan yang terkait dan berlaku sesuai dengan sasaran target kinerja BPOM.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Sumber Daya Manusia (SDM) PRKOM telah mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, *in house training*, seminar/ *workshop* teknis dan manajerial yang relevan. Forum pembelajaran SDM PRKOM juga dilakukan melalui *Knowledge Sharing*, khususnya terkait dengan informasi, pengetahuan yang diperoleh pada waktu mengikuti pelatihan/seminar/ *workshop* ataupun pertemuan ilmiah lainnya.

Kegiatan riset dan kajian Tahun 2020 meliputi Kajian Peredaran Obat-Obat yang Disalahgunakan, Kajian Efektivitas Implementasi Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017, Kajian Peningkatan Efektivitas Implementasi CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat Tradisional, Kajian Keamanan Pangan *Indonesian Risk Assessment Centre* (INARAC) Tahun 2020, Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha dalam Proses Pendaftaran Pangan Olahan di BPOM, Survei Persepsi Lintas Sektor Terhadap Program Keamanan Pangan Nasional, Survei Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas



Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Survei Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM, Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap ketentuan BPOM, Kajian Cemaran *N-Nitrosodimethylamine* (NDMA) dalam *Metformin*, Kajian Terkait Kratom (*Mitragyna Speciosa*), Kajian Analisis *Asbestos* dalam Produk Kosmetika.

Workshop Internalisasi Reformasi Birokrasi, Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja, Peningkatan Infrastruktur dan pendukung riset dan kajian, Monitoring/Evaluasi Kinerja Riset dan Kajian, Layanan internal dan Layanan Perkantoran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
HIGHLIGHT KEGIATAN PRKOM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Visi dan Misi dan Budaya Organisasi.....	2
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi.....	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	7
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
1. Data Kepegawaian.....	7
2. Kebutuhan Pegawai.....	9
3. Peningkatan Kompetensi SDM.....	9
B. SARANA DAN PRASARANA.....	13
C. ANGGARAN.....	16
BAB III HASIL KEGIATAN.....	18
SASARAN KINERJA 1 DAN INDIKATOR KINERJA 1.....	18
a. Pelaksanaan Riset dan Kajian Obat dan Makanan.....	18
b. Forum Konsultasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan.....	20
SASARAN KINERJA 2 DAN INDIKATOR KINERJA 2.....	21
a. Rapat Pertemuan Penyusunan Rencana Induk Riset (RIR).....	21
SASARAN KINERJA 3 DAN INDIKATOR KINERJA 3.....	22
a. Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Riset dan Kajian.....	22
b. Rapat Monitoring dan Evaluasi Setiap Triwulan.....	22
c. Evaluasi Kinerja.....	23
d. Penerapan Sistem Mutu.....	23
SASARAN KINERJA 4 DAN INDIKATOR KINERJA 4.....	25
a. Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan.....	25
b. Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah.....	26
c. Publikasi Ilmiah.....	28
SASARAN KINERJA 5 DAN INDIKATOR KINERJA 5, INDIKATOR KINERJA 6..	30
a. Workshop Penguatan Nilai – Nilai RB.....	30

b. Mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Kinerja	31
c. Melakukan Assessment terhadap SAKIP dan RB	31
d. Penyusunan Laporan Kinerja	31
e. Penyusunan Rencana Strategis	31
SASARAN KINERJA 6 DAN INDIKATOR KINERJA 7	32
a. Pelatihan <i>In House Training</i>	32
b. Mengikuti Pelatihan - Pelatihan di Lembaga Pelatihan	34
c. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM secara Webinar	35
d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	40
e. Mengikuti Pendidikan Pelatihan terkait Jabatan Fungsional	40
SASARAN KINERJA 7 DAN INDIKATOR KINERJA 8	41
a. Pemanfaatan Email Corporate	41
b. Pengembangan Sistem Informasi Riset	41
c. Pengadaan Alat Pengolah Data	44
SASARAN KINERJA 8 DAN INDIKATOR KINERJA 9, INDIKATOR KINERJA 10	45
a. Melakukan Revisi POK dan DIPA	45
b. Menetapkan Tim Pengelola Keuangan	45
c. Mengikuti Workshop PIPK	45
PENUTUP	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PRKOM	4
Gambar 2. Peta Strategi Level 2 PRKOM	6
Gambar 3. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 4. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 5. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Usia.....	8
Gambar 6. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	8
Gambar 7. Evaluasi Kinerja “Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja”	23
Gambar 8. Forum Diseminasi hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kebutuhan Pegawai PRKOM Tahun 2020	9
Tabel 2.	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PRKOM	10
Tabel 3.	Daftar Pengadaan Fasilitas Perkantoran Tahun 2020	13
Tabel 4.	Daftar Sarana dan Prasarana PRKOM	14
Tabel 5.	Realisasi Anggaran PRKOM Tahun 2020	16
Tabel 6.	Pelatihan Penulisan Ilmiah	27
Tabel 7.	Daftar Publikasi Ilmiah Pegawai PRKOM	28
Tabel 8.	<i>In House Training</i>	32
Tabel 9.	Pelatihan di Lembaga Pelatihan	34
Tabel 10.	Pelatihan yang dilakukan PPSDM	35
Tabel 11.	Pelatihan Jabatan Fungsional	40
Tabel 12.	Pengadaan Alat Pengolah Data	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Fasilitas Perkantoran yang Diadakan Tahun 2020	47
Lampiran 2. Ringkasan Eksekutif Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan	50

HIGHLIGHT KEGIATAN PRKOM

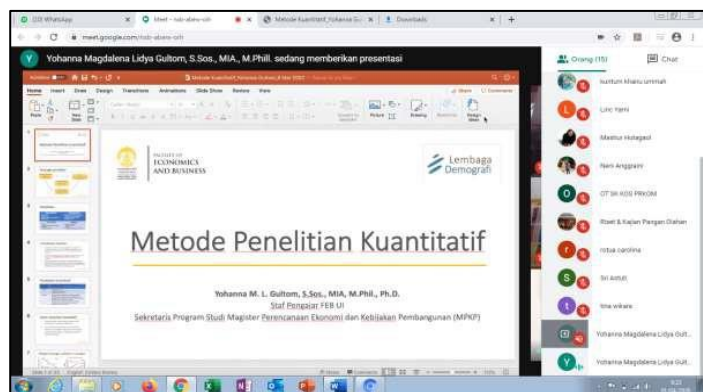
Februari



Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2020 diselenggarakan oleh PRKOM yang dihadiri oleh seluruh staf PRKOM, 2 (dua) personil dari Balai Besar POM di Bandung, serta mengundang narasumber Bapak Yuliantri Rahadiyanto, S.IP, M.Si dan Bapak Ginansah Munggaran dari BAPPELITBANG Kota Bandung dan Bapak Arif dari KemenpanRB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terus berupaya melakukan penguatan nilai-nilai Reformasi Birokrasi di PRKOM. Kegiatan berlangsung selama tiga hari pada tanggal 26 – 28 Februari 2020 Hotel Aston Braga, Bandung.

April

Pada Bulan April PRKOM melakukan Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi dalam pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian kuantitatif khususnya teknik pengembangan kuesioner. Target kompetensi yang ingin



dikembangkan adalah kemampuan menggunakan metode penelitian kuantitatif dari setiap peserta. Penyedia jasa pelatihan berasal dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia dengan pengajar sebanyak 2 orang yaitu Yohanna Magdalena L. Gultom, Ph. D dan Chandra Rila Putra. Peserta pelatihan sebanyak 12 orang, Pelatihan dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 1 dan 3 April 2020 secara *online* menggunakan *Google Meet*.

Agustus



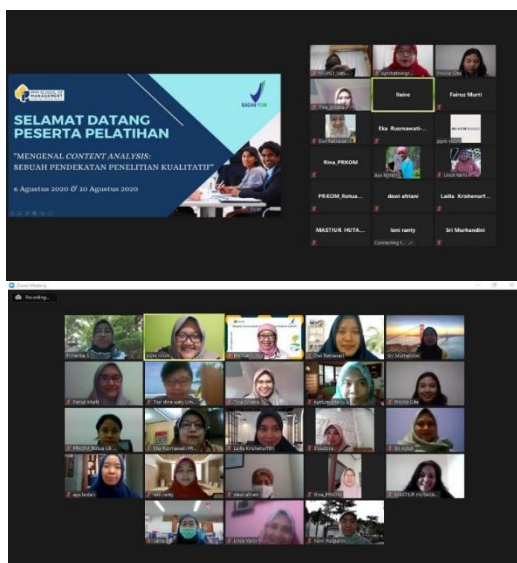
Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan Kajian Peredaran Obat-Obat yang sering Disalahgunakan yang telah memasuki tahap penyusunan desain dan metodologi, maka diadakan rapat pembahasan dengan *stakeholder* kegiatan kajian peredaran obat-obat yang

sering disalahgunakan. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Profesi (IAI, IBI, POGI, PDSKJI, PERSI) dan Unit Teknis Kedeputan. Rapat dibuka oleh Deputy Bidang Pengawasan Bidang Pangan Olahan. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas desain instrumen dan teknis pengumpulan data Kajian Peredaran Obat-Obat yang Sering Disalahgunakan.

Pada Bulan Agustus PRKOM melaksanakan Audit QMS ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh auditor eksternal dari TUV Rheinland Kegiatan audit surveilan dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan program



dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit surveillance bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya; 2) Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar. Hasil audit QMS 9001: 2015 atas PRKOM yaitu mendapat sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pada Audit QMS ISO 9001:2015, PRKOM tidak ada temuan dan ada beberapa aspek positif.



Dalam rangka meningkatkan Kompetensi Pegawai Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dalam melaksanakan Kegiatan Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan, maka dilaksanakan Pelatihan In-House Training Metode Penelitian Kualitatif Pelatihan sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus dan 10 Agustus 2020. Pelatihan berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, peserta mengikuti pelatihan dengan baik, terutama peserta dapat memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Hal tersebut dapat dilihat dari pengerjaan

posttest dan pretest, dimana hasil yang didapatkan peserta cukup baik.

September

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian peningkatan Implementasi Kebijakan CPOTB Bertahap terhadap UMKM Obat tradisional, dilaksanakan Forum Group Discussion dan Indepth Interview kepada beberapa UMKM yang dihadiri oleh Dr.



Syam Surya Syamsi dan Bapak Yanto sebagai fasilitator serta Pakar Ahli dari Universitas Indonesia, tim Peneliti PRKOM, dan 9 Narasumber perwakilan UMKM.

Oktober



Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman dilaksanakan selama 6 (hari) pada tanggal 27-29 Oktober 2020 dan pada tanggal 7 - 8 November 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat pada kegiatan sosialisasi ini cukup tinggi, acara dihadiri sekitar 250 orang per hari perwakilan dari berbagai komunitas, dinas Kesehatan dan Pemda setempat. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang lengkap dan dibatasi jumlah peserta, sehingga dalam 1 (satu) hari dilakukan 2 (dua) sesi yang berbeda. Sosialisasi

tersebut juga di hadiri oleh Bapak Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang merupakan mitra kerja BPOM dan sebagai tokoh masyarakat yang menjadi narasumber pada kegiatan ini, juga menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan hidup sehat dalam masa pandemi Covid-19 dengan selalu menerapkan 3M dan menjaga nutrisi untuk mengurangi indeks stunting yang ada di Kabupaten Blora. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat agar membantu BPOM dalam melaksanakan tugasnya dengan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih obat dan makanan.

Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman dilakukan juga di Jakarta pada tanggal 24 Oktober dan 31 Oktober 2020 Pelaksanakan kegiatan ini mengikuti prosedur protokol kesehatan yang berlaku pada masa PSBB Transisi di sekitar wilayah DKI Jakarta. Pertemuan dilakukan dalam 2 sesi acara, dengan membagi waktu pelaksanaan masing-masing selama 3 jam. Interaksi dengan peserta dilaksanakan secara langsung di dalam ruangan dengan jumlah tidak lebih dari 50% kapasitas ruangan, dan secara online menggunakan aplikasi zoom meeting. Sosialisasi tersebut juga di hadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., yang menyampaikan arahan tentang Obat dan Makanan yang Halal dan Toyiyib, serta tugas Komisi IX DPR RI. Arahan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang konsep Obat dan Makanan yang Halal dan Toyiyib sesuai ajaran agama secara universal sejalan dengan aturan Obat dan Makanan yang aman dan sehat yang diawasi oleh BPOM.

November



Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Efektivitas Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2017, dilaksanakan *Forum Group Discussion* dan *Indepth Interview* kepada beberapa instansi terkait yang dihadiri oleh Dr. Syam Surya Syamsi dan Bapak Yanto sebagai fasilitator serta Pakar Ahli dari Universitas Indonesia, tim peneliti PRKOM, dan 10 orang

narasumber dari 10 instansi terkait dengan Inpres ini.

Desember

PRKOM melakukan Kegiatan Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan pada tanggal 10 Desember 2020. Kegiatan ini dibuka oleh Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.KM selaku Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Forum ini bertujuan dalam mendiseminasikan hasil kajian riset



dan kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan pada tahun 2019 lalu. Acara Forum Diseminasi Hasil Riset dihadiri oleh perwakilan dari Unit Pusat Badan POM, serta Balai Besar/Balai dan Loka POM di seluruh Indonesia, baik hadir secara luring ataupun daring. Pada acara pembukaan ini, Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyampaikan bahwa acara Diseminasi Hasil Riset ini adalah acara rutin PRKOM yang diselenggarakan setiap tahun dengan agenda penyampaian hasil riset tahun sebelumnya (2019). Pada sambutannya KaPRKOM berharap supaya hasil riset dan kajian dapat berguna untuk peningkatan pengawasan Obat dan Makanan khususnya untuk membantu pengambilan keputusan kebijakan di Pusat ataupun di daerah. Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu. Salah satu isu internal yang dapat mempengaruhi sasaran dan kinerja Badan POM adalah masih lemahnya dukungan riset dan kajian dalam mendukung keputusan dan implementasi kebijakan, oleh karena itu untuk menjamin bahwa kebijakan, regulasi, standar, yang dibuat oleh Badan POM mempunyai kualitas yang baik,

maka perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat yang mampu menangkap perubahan lingkungan strategi, sehingga bisa memberikan perubahan rekomendasi terhadap Badan POM.



PRKOM melaksanakan Forum Konsultasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan pada tanggal 11 Desember 2020, pada kesempatan ini Kepala PRKOM menyampaikan bahwa forum ini merupakan forum konsultasi riset dan kajian, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu wadah untuk

mendiskusikan rencana riset dan kajian Obat dan Makanan ke stakeholder internal terkait Obat dan Makanan, sehingga rencana riset dan kajian bisa tepat arah dan tepat guna, dan nantinya bisa dimanfaatkan dan memperoleh masukan dan inovasi riset dan kajian, juga meningkatkan kerjasama antar unit kerja di lingkungan Badan POM. Sebagaimana arahan dari Kepala Badan POM, bahwa Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan melaksanakan riset yang mempunyai nilai strategis, bersifat makro kemudian lintas komoditi dan tergantung kebutuhan untuk penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada forum ini dihadiri oleh Dr. Muhamad Dimiyati dari BRIN yang menyampaikan materi “Arah Kebijakan Riset Nasional”, Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dari Kemenkes yang menyampaikan materi “Isu Strategis Kebijakan Kesehatan, Bapak Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, PhD dari Kementerian PPN / BAPPENAS yang menyampaikan materi “Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Untuk Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, Drs. Anthonius Malau, M.Si dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menyampaikan materi “Perdagangan melalui Sistem Elektronik-Peran dan Tantangan Lembaga Pengawas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sesuai keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dimana Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. pelaksanaan riset dan kajian di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan terdiri atas: a. Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; c. Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan

riset dan kajian di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan riset dan kajian di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan riset dan kajian di bidang pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian pangan olahan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian pangan olahan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

1. VISI DAN MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Sebagai unit dari BPOM, visi dan misi PRKOM mengacu pada visi dan misi BPOM yaitu:

VISI



“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”



Budaya Organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya organisasi BPOM adalah sebagai berikut:

1. PROFESIONAL

Menegakkan profesionalisme dalam integritas, obyektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. INTERGRITAS

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. KREDIBILITAS

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. KERJASAMA TIM

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. INOVATIF

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. RESPONSIF/CEPAT TANGGAP

Antisipatif dan 3esponsive dalam mengatasi masalah.

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, sebagai berikut: PRKOM dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi 3 (tiga) orang Kepala Bidang yaitu:

1. Bidang Riset dan Kajian Obat dan NAPPZA;
2. Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi PRKOM

Masing-masing Bidang/Subbagian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Riset dan Kajian Obat dan NAPPZA mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif.
2. Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian pangan olahan.
4. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan antara lain urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, pengadaan sarpras pengelolaan perpustakaan.
5. Kelompok Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS POKOK

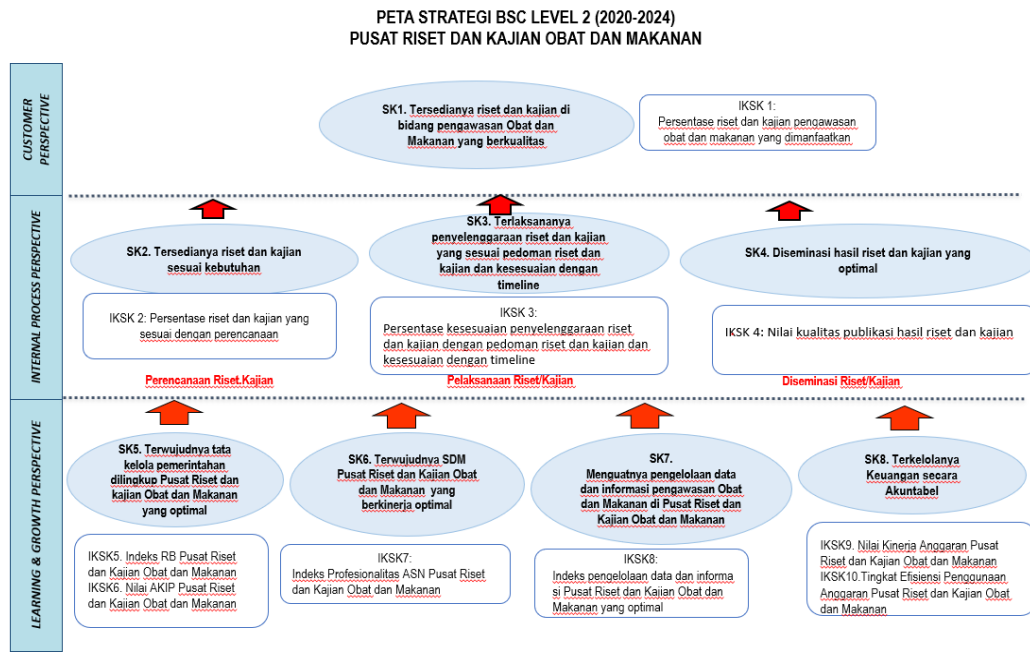
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM bahwa Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan.

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat - tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
2. Pelaksanaan riset dan kajian di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Sasaran kegiatan PRKOM ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki PRKOM. Dalam kurun waktu empat tahun kedepan (2020-2024) diharapkan PRKOM dapat

mencapai sasaran strategis level 2 PRKOM yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Level 2 PRKOM

BAB II

PENGLOLAAN SUMBERDAYA

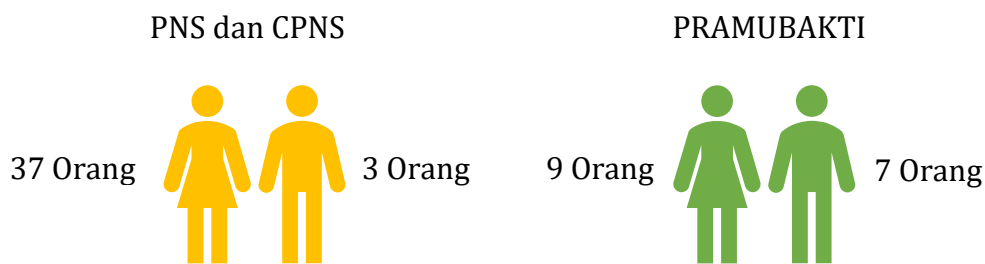
a. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk Mendukung tugas-tugas PRKOM sesuai tugas dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensinya yang memadai sesuai kebutuhan organisasi. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM PRKOM untuk terselenggarakan kegiatan riset dan kajian yang berkualitas.

1. Data Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya SDM PRKOM terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil, 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Mengingat beban pekerjaan yang semakin tinggi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi PRKOM dibantu oleh 16 orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

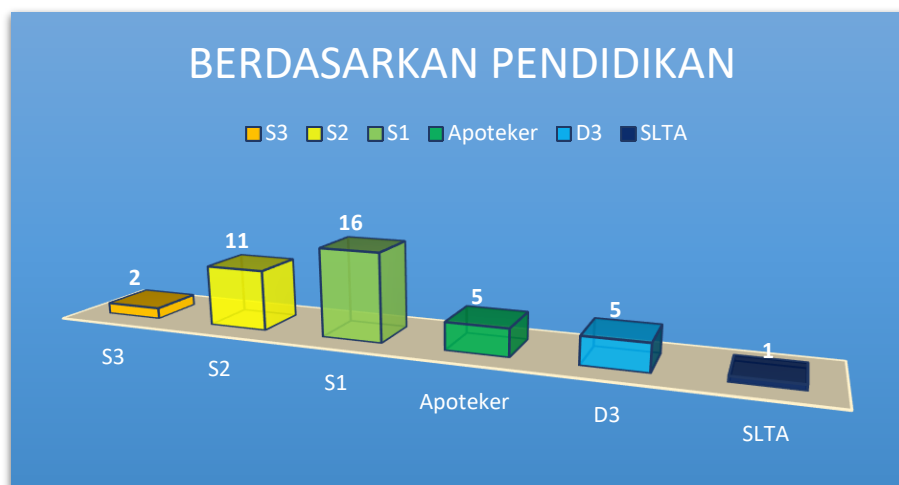
a. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



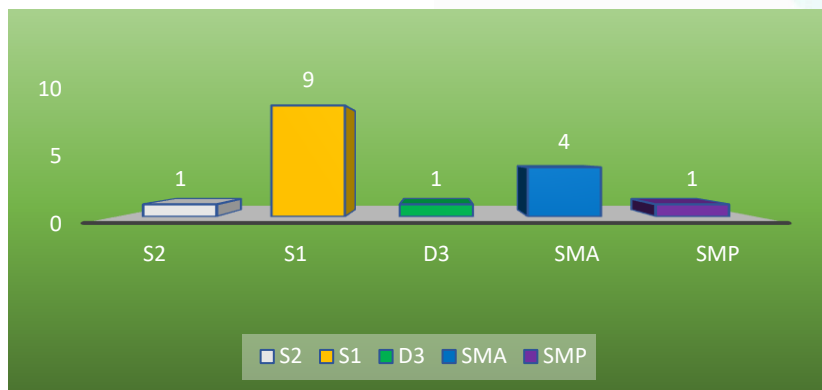
Gambar 3. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PNS dan CPNS

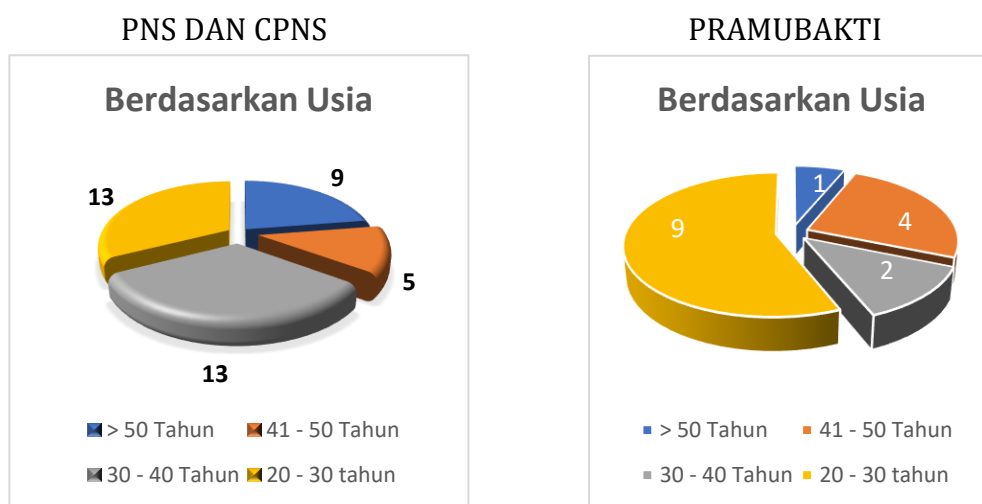


PRAMUBAKTI



Gambar 4. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Pendidikan

c. Data Pegawai Berdasarkan Usia



Gambar 5. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Usia

d. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat



Gambar 6. Kondisi SDM PRKOM Berdasarkan Golongan Kepangkatan

2. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020 di lingkungan PRKOM terdapat kekurangan pada segi kuantitas jumlah pegawai. Dari analisis Beban Kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi PRKOM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai PRKOM Tahun 2020

Jabatan	Kelas Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
PFM Madya	11	13	7	6
PFM Muda	9	16	10	6
PFM Pertama	8	12	0	11
Analisis Kebijakan Madya	11	3	3	0
Analisis Kebijakan Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Pertama	8	2	0	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Perencana Pertama	8	1	0	0
JF Analisis Keuangan APBN (PPK)	9	1	2	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	1	0	0
Pranata Komputer Pelaksana	7	1	0	0
Arsiparis Pelaksana	7	1	0	0
Analisis Kepegawaian Pelaksana	7	1	0	0
Analisis Laporan Keuangan	7	1	2	0
Analisis Pengelola BMN	7	1	1	0
Bendahara	7	1	2	0
Pengadministrasi Umum	5	1	2	0
JUMLAH		58	32	23

3. Peningkatan Kompetensi SDM

PRKOM senantiasa melakukan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang mendukung riset dan kajian Obat dan Makanan, berupa pelatihan teknis dan manajerial, seminar/*workshop* yang dilakukan oleh pihak internal Badan POM maupun eksternal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PRKOM

NO.	Pelatihan	Jumlah Peserta
1	<i>Workshop</i> Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang
2	<i>Workshop</i> dalam rangka Perencanaan dan komunikasi hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	1 Orang
3	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Monev Online	2 Orang
4	Pelatihan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Orang
5	Uji Kompetensi Jabatan Analisis Kebijakan	1 Orang
6	<i>International Forum On 3-MCPD and GE</i>	2 Orang
7	Pelatihan <i>Graphic Design</i> Tingkat Dasar Angkatan I Tahun 2020	1 Orang
8	Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Penyusunan Kebutuhan SDM di Lingkungan Badan POM	1 Orang
9	Bimtek Sertifikasi CPOTB	1 Orang
10	<i>E-learning</i> Tingkat Dasar Jabatan Fungsional PFM	1 Orang
11	<i>Training For Trainer - Supervisor Development Program</i>	1 Orang
12	Uji Kompetensi Calon Formasi Jabatan PFM	1 Orang
13	Workshop dalam rangka Perencanaan dan komunikasi hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	1 Orang
14	Workshop Internalisasi Reformasi Birokrasi	38 Orang
15	BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE TAHUN 2020	3 Orang
16	Pelatihan Analisis Kepegawaian Keterampilan	1 Orang
17	Bimtek <i>Regulatory Impact Assessment</i>	10 Orang
18	Workshop SPSE 2020	1 Orang
19	<i>Capacity Building Agent of Change</i>	1 Orang
20	<i>Awareness</i> QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2020	1 Orang
21	<i>Workshop</i> Virtual Pembahasan Non-Tariff Measures (NTMs) Peraturan/Regulasi Badan POM	2 Orang
22	Pelatihan Analisis Kebijakan (CPNS) Angkatan XII	2 Orang
23	<i>Pengembangan Tools Penelitian Metode Kuantitatif</i>	9 Orang
24	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Orang
25	Sosialisasi Penilaian Kompetensi di PRKOM	10 Orang
26	Pelatihan online "Deteksi Covid-19 menggunakan Real time PCR serta Alat Pelindung Diri Uji Covid-19"	1 Orang
27	Diskusi Penerapan Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2020	4 Orang
28	Bimbingan Teknis Karakteristik dan <i>Patogenitas SARS CoV-2 dan Biosafety & Biosecurity</i> Uji Covid-19	1 Orang
29	Pelatihan dan Kegiatan Penulisan Artikel Ilmiah (Tahap 1)	8 Orang
30	Seminar Online: Covid-19	1 Orang
31	Sosialisasi RB Online "Membangun Zona Integritas BPOM"	1 Orang
32	Seminar <i>Online</i> Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan " <i>Coaching dan Mentoring</i> Kepegawaian"	1 Orang
33	Sosialisasi RB <i>Online</i> , "Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Manajemen Perubahan dan Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM"	1 Orang
34	<i>Seminar Online Transformational Leadership</i>	2 Orang
35	Pelatihan Penjenjangan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1 Orang
36	<i>Seminar Online Seminar Security Awareness</i>	1 Orang
37	Sosialisasi <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Penataan Organisasi dan Kelembagaan BPOM	1 Orang
38	<i>Seminar Online ICT Literacy</i>	1 Orang
39	Sosialisasi dan Edukasi Obat Untuk Penanggulangan COVID-19	1 Orang
40	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi Mengelola perubahan	2 Orang
41	Seminar Online POAC / PDCA dalam Manajemen Organisasi	4 Orang

NO.	Pelatihan	Jumlah Peserta
42	Sosialisasi RB <i>Online</i> "Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penataan SDM Aparatur BPOM"	3 Orang
43	Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Road Map RB 2020-2024	4 Orang
44	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi Membangun Integritas Tim	3 Orang
45	Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Road Map RB 2020-2024	1 Orang
46	Sosialisasi <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penataan Tata Laksana BPOM	1 Orang
47	Diklat PPBJ	1 Orang
48	Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB	2 Orang
49	Seminar: Menghadapi 4th <i>Waves</i> Pasca Pandemi	1 Orang
50	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi Pengambilan Keputusan	3 Orang
51	Sosialisasi <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Peningkatan Akuntabilitas BPOM	4 Orang
52	Sosialisasi <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan BPOM	1 Orang
53	Sosialisasi Evaluasi Internal Dalam Rangka Implementasi SAKIP di lingkungan BPOM	2 Orang
54	Webinar : "Perlindungan Anak dari Manipulasi Industri Rokok dan Penggunaan Rokok Serta Nikotin"	1 Orang
55	Sosialisasi <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM	4 Orang
56	Sosialisasi <i>Online</i> Aplikasi SIMPONI	6 Orang
57	<i>Sharing</i> Santai Vol. 1 Pengelolaan Akun Media Sosial <i>Official</i>	1 Orang
58	Sosialisai <i>Online</i> Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Publik BPOM	1 Orang
59	Sosialisasi RB <i>Online</i> Program, kegiatan dan indikator kinerja pelayanan publik BPOM	1 Orang
60	<i>Allergy or Flu : How to Identify and treat</i>	1 Orang
61	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi "All Manager is HR Manager Seminar <i>Online</i> "	1 Orang
62	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi Pengembangan Diri dan Orang Lain	3 Orang
63	<i>In House Training</i> Pelayanan Publik	1 Orang
64	Seminar <i>Online</i> " <i>Building the New Organization DNA for Post-Covid-19 Recovery</i> "	3 Orang
65	Seminar <i>Online</i> "Kolaborasi antar Generasi dalam Organisasi"	1 Orang
66	Webinar K3: Melanjutkan Bisnis dengan Sehat, Selamat dan Produktif	2 Orang
67	Pengembangan kompetensi pengelolaan diri dan orang lain dengan tema " <i>Coaching for Mellenials</i> "	2 Orang
68	Pengembangan Kompetensi pengelolaan diri dan orang lain dengan tema " <i>Coaching for Leader</i> "	1 Orang
69	Seminar <i>Online</i> "Komunikasi dan Negoisasi"	2 Orang
70	Webinar Pengembangan Kompetensi Komunikasi dan Pelayanan Publik	1 Orang
71	Sosialisasi Jurnal Ilmiah Pengawasan Obat dan Makanan	1 Orang
72	Pengembangan kompetensi inovasi dan creative thinking dengan tema " <i>Creative and Innovative Thinking</i> "	4 Orang
73	<i>Seminar Online "Result Orientation Management"</i>	2 Orang
74	Pengembangan kompetensi inovasi dan <i>creative thinking</i> dengan tema "Membangun Ekosistem Inovasi dalam Organisasi"	1 Orang
75	Seminar <i>Online</i> Manajemen Bisnis Obat dan Makanan di Indonesia	2 Orang
76	Webinar Pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja dengan tema "Manajemen Waktu"	3 Orang
77	Webinar Pengantar Manajemen Keuangan Negara	1 Orang
78	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan <i>Online</i> materi Pengambilan Keputusan	3 Orang

NO.	Pelatihan	Jumlah Peserta
79	Workshop Internalisasi Reformasi Birokrasi	1 Orang
80	Sosialisasi Permenpan RB No. 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1 Orang
81	Webinar Membangun <i>Corporate Culture</i> berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Organisasi	1 Orang
82	Webinar Penjaminan Mutu dalam Pemanfaatan dan Pengolahan <i>Plasma Konvalesen</i>	3 Orang
83	Seminar <i>Online</i> Berdamai dengan <i>New Normal</i> , Manajemen SDM ditengah <i>Covid-19</i>	1 Orang
84	Bimbingan Teknis Perkembangan HR Management dan Implementasinya di Sektor Publik	1 Orang
85	Workshop Internalisasi Reformasi Birokrasi	1 Orang
86	Peran Pengelola Kepegawaian BPOM dalam Manajemen SDM BPOM	2 Orang
87	Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah (tahap 2)	9 Orang
88	Webinar Pengembangan Kompetensi Inovasi dan <i>Creative Thinking</i>	1 Orang
89	Bimbingan Teknis Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya Melalui Penyedia dan Swakelola	38 Orang
90	Manajemen Stress, pengelolaan kinerja dibawah tekanan	6 Orang
91	<i>Seminar Online Personal Management</i>	3 Orang
92	Webinar dengan tema " <i>Managing Your Boss</i> "	2 Orang
93	<i>Seminar Online Buildings Initiative For Professional At Work</i>	1 Orang
94	Seminar Online Pengelolaan aset data/ informasi /pengetahuan di era revolusi industri 4.0	2 Orang
95	Manajemen Aset Tangible dan Intangible di era revolusi industri 4.0	2 Orang
96	Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di lingkungan BPOM RI	5 Orang
97	<i>E-Learning</i> Dasar-Dasar Penyusunan APBN	1 Orang
98	Seminar Online Manajemen Konflik Antar Generasi di Tempat Kerja	1 Orang
99	Sosialisasi dan Internalisasi Budaya PIKKIR di PRKOM	38 Orang
100	Pelatihan Asesor Kompetensi Teknis Tahun 2020 sebagai Asesor Madya Fungsi Riset	1 Orang
101	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran	1 Orang
102	Pelatihan Dasar-dasar Statistika dan Penerapannya dalam Perumusan Kebijakan	1 Orang
103	<i>Seminar Online Modern Office Management And Filing System</i>	2 Orang
104	Seminar Keterbukaan Informasi Publik	1 Orang
105	Arsip Digital: Kewajiban atau Pilihan?	2 Orang
106	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I BPOM Tahun 2020	1 Orang
107	Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPOM	1 Orang
108	<i>Workshop Bridging Competency</i> - Publikasi Kajian Kebijakan	3 Orang
109	<i>Workshop Bridging Competency</i> - Publikasi Kajian Kebijakan	1 Orang
110	Seminar Online Pengambilan Keputusan - <i>This way or That Way?</i> (Sukses membuat keputusan dengan analisis data dan informasi)	1 Orang
111	<i>Pelatihan In-House Training Metode Penelitian Kualitatif</i>	20 Orang
112	<i>Self-Learning: Why It's Essential for You in the Industry 4.0</i>	1 Orang
113	<i>Knowledge Sharing Sars Cov2: What and How to Deal with it?</i>	38 Orang
114	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1 Orang
115	<i>Seminar Online The Happiness in The Differences (Sinergisme dalam Bingkai Kebhinekaan)</i>	1 Orang
116	<i>Integrity From Heart (How to Improve Integrity in the Workplace)</i>	1 Orang
117	Bimbingan Teknis Online " <i>Coaching dan Mentoring</i> "	1 Orang
118	<i>Pelatihan In-House Training Penyusunan Policy Brief</i>	14 Orang
119	Webinar Manajemen Pengembangan Kinerja	1 Orang
120	<i>webinar dengan topic Strategic Change Management for Sustainability Organizations</i>	1 Orang

NO.	Pelatihan	Jumlah Peserta
121	Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!	1 Orang
122	Sosialisasi Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai dan Sistem Docu Digital	1 Orang
123	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual	3 Orang
124	<i>Bimbingan Teknis Online Communication Skills for Excellent Services</i>	2 Orang
125	Sosialisasi SE MENPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dan Sosialisasi Implementasi SIKD Versi Baru	1 Orang
126	<i>Bimbingan Teknis Online : Building Trust and Keep Service Excellence</i>	1 Orang
127	<i>Pelatihan Regulatory Impact Assessment</i>	1 Orang
128	<i>Bimbingan Teknis Online : Critical Thinking, Problem Solving and Effective Decision Making</i>	1 Orang
129	<i>“Enjoying Life with Neuro Linguistic Programming (NLP)”</i> (Mengelola Pikiran untuk Hidup lebih bahagia)	1 Orang
130	Seminar Ilmiah dan Forum Diseminasi Hasil Riset Pusat Riset Obat dan Makanan	38 Orang
131	Training Amazing You	5 Orang

b. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan hal sangat penting dalam menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PRKOM, oleh karena itu pada tahun 2020 dilakukan pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Analisa kebutuhan pada tahun 2020. Adapun pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 3. dan foto pengadaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 3. Daftar Pengadaan Fasilitas Perkantoran Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Penempatan
1	PC	2	Ruang Staf Lt.1
2	Printer	1	Ruang Staf Lt.1
3	Scanner	2	Ruang Staf Lt.1
4	Laptop	6	Ruang Staf Lt.1
5	Printer Portable	1	Ruang Staf Lt.1
6	Handycam	1	Ruang Staf Lt.1
7	Microphone	3	Ruang Staf Lt.1
8	Dispenser	3	Ruang Staf Lt.1, Ruang Rapat Lt 1, Ruang Staf Lt.2
9	Pointer	2	Ruang Staf Lt.1
10	Tripod	1	Ruang Staf Lt.1
11	Penghancur Kertas	1	Ruang Staf Lt.1
12	Standing Brecket	1	Ruang Rapat Lt.1
13	AC 2 PK	2	Ruang Staf Lt.1
14	AC 1 PK	1	Ruang Rapat Lt. 1

Dan Daftar Sarana dan Prasarana yang ada di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Daftar Sarana dan Prasarana PRKOM

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Air	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
3	Sepeda Motor	1	Baik
4	Mesin Pompa air PMK	1	Baik
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
6	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	5	Baik
8	Lemari Kayu	20	Baik
9	Rak Besi	10	Baik
10	Rak Kayu	2	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik
12	White Board	1	Baik
13	Copy Board/Elektric White Board	1	Baik
14	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
15	White Board Electronic	1	Baik
16	Laser Pointer	2	Baik
17	LCD Projector/Infocus	3	Baik
18	Meja Kerja Besi/Metal	9	Baik
19	Meja Kerja Kayu	18	Baik
20	Kursi Besi/Metal	79	Baik
21	Kursi Kayu	9	Baik
22	Meja Rapat	1	Baik
23	Meja Komputer	1	Baik
24	Mesin Cuci	0	Baik
25	A.C. Split	11	Baik
26	Exhause Fan	6	Baik
27	Kitchen Set	2	Baik
28	Tabung Gas	0	Baik
29	Televisi	4	Baik
30	Microphone	3	Baik
31	Camera Video	1	Baik
32	Dispenser	3	Baik
33	Handy Cam	1	Baik
34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik
35	Voice Recorder	5	Baik

36	Tripod Camera	2	Baik
37	Camera Digital	1	Baik
38	LCD Monitor	1	Baik
39	Pesawat Telephone	1	Baik
40	Facsimile	1	Baik
41	Unit Tape Recorder	1	Baik
42	Bracket Holder	1	Baik
43	Kursi Zeis	13	Baik
44	Refrigerator	1	Baik
45	Mesin Scanning	1	Baik
46	Alat Pemadam Kebakaran	7	Baik
47	Generator	1	Baik
48	Microwave Oven	1	Baik
49	Generator Set (Lab Scale)	2	Baik
50	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Baik
51	System/Power Supply Lainnya	1	Baik
52	Kamera Digital	1	Baik
53	Mini Komputer	2	Baik
54	Local Area Network (LAN)	2	Baik
55	P.C Unit	22	Baik
56	Note Book	38	Baik
57	Tablet PC	10	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	Baik
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
60	External/ Portable Hardisk	15	Baik
61	Server	3	Baik
62	Router	2	Baik
63	Modem	6	Baik
64	Air Conditioning (AC)	12	Baik
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
66	Pagar Lainnya	1	Baik
67	Instalasi Gardu Gas Lainnya	1	Baik
68	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	1	Baik
69	Instalasi Lain-lain	1	Baik
70	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	Baik
71	Jaringan Gas Lainnya	1	Baik
72	Monografi	227	Baik
73	Referensi	2	Baik
74	Buku Lainnya	44	Baik
75	Software Komputer	4	Baik

c. ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2020 tanggal 12 November 2020 yang dituangkan ke dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) Rp21.763.758.000,- (**Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah**). Pada triwulan II ini terdapat perubahan APBNP yang membuat pagu anggaran PRKOM berkurang menjadi **Rp. 18.245.125.000,-** atau turun sebesar **16,17%** dari PAGU anggaran awal. Total realisasi anggaran PRKOM pada akhir tahun adalah sebesar **Rp.16.221.306.792,-** atau sebesar **88,91%** dari PAGU APBNP PRKOM. Realisasi ini merupakan realisasi final untuk tahun 2020. Realisasi ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan unit lain dilingkungan BPOM atau terendah kedua setelah Biro Umum dan SDM. Berikut disajikan data realisasi anggaran PRKOM per kegiatan tahun 2020.

Tabel 5. Realisasi Anggaran PRKOM Tahun 2020

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
4.135.001 Riset dan Kajian yang dimanfaatkan				
A	Kajian Peredaran Obat-Obatan yang disalahgunakan	628.150.000	616.920.005	98,23
B	Pengukuran IKU BPOM 2020	2.567.160.000	2.491.117.753	97,04
C	Kajian Keamanan Pangan (INARAC)	363.900.000	351.795.600	96,67
D	Survei Perilaku Keamanan Pangan pada Pelajar	214.025.000	201.334.603	94,07
E	Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Obat dan Makanan	195.050.000	182.941.644	93,79
F	Survei Kendala Penerapan CPOTB bertahap oleh UMKM OT	546.265.000	477.371.450	87,39
G	Kajian Implementasi Inpres no.3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan	571.025.000	512.489.839	89,75
H	Peningkatan Kemampuan Analisis Data Kajian	46.825.000	40.525.400	86,55
I	Forum Konsultasi dan Diseminasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020	146.370.000	138.626.000	94,71
L	Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman	2.090.110.000	2.058.046.529	98,47
<i>Peningkatan Infrastruktur dan pendukung Riset dan Kajian</i>				
A	Pengadaan Penunjang Riset dan Kajian	530.986.000	488.033.908	91,91

Peningkatan kinerja berkelanjutan				
A	Seminar/Workshop/Pelatihan/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	39.210.000	28.797.626	73,44
C	Pelatihan teknis/Mnajemen di Kantor Sendiri (<i>In House Training</i>)	145.104.000	143.399.900	98,83
D	Penerapan Sistem Mutu	73.965.000	68.006.150	91,94
E	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	152.520.000	142.920.229	93,71
F	Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja	238.660.000	221.475.450	92,80
G	Konsolidasi Kemitraan Internal dan Eksternal BPOM	12.210.000	10.505.900	86,04
H	Pengembangan Sistem Informasi Riset	61.140.000	57.608.000	94,22
I	Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi	317.328.000	315.358.499	99,38
4.135.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	233.000.000	221.040.910	94,87
A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83.500.000	79.119.000	94,75
B	Renovasi Gedung dan Bangunan	44.000.000	43.912.000	99,08
4.135.994 Layanan Perkantoran				
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.590.053.000	5.198.520.136	78,88
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	131.360.000	119.235.600	90,77
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	304.344.000	298.024.699	97,92
C	Perawatan Kendaraan Kantor	43.640.000	42.820.850	98,12
D	Langganan daya dan Jasa	480.000.000	381.158.772	79,41
E	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	158.000.000	152.744.100	96,67
F	Operasional Perkantoran	1.027.360.000	945.178.000	92,20
G	Pemeriksaan Kesehatan	210.000.000	199.574.362	95,04
TOTAL		18.245.125.000	16.228.602.914	88,95

Kendala penyerapan anggaran tahun 2020 ini terdapat pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PRKOM yang tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan pemberlakuan kebijakan pemotongan pembayaran THR dan Gaji ke-13 pegawai. Apabila tanpa memperhitungkan realisasi dari belanja Gaji dan tunjangan, realisasi anggaran PRKOM adalah sebesar **Rp.11.024.550.278 (94,59%)** dari PAGU **Rp. 11.655.072.000**.

BAB III HASIL KEGIATAN

1

SASARAN KEGIATAN 1
TERSEDINYA RISET DAN KAJIAN DI BIDANG PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN YANG BERKUALITAS

INDIKATOR KINERJA 1
Persentase Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang
dimanfaatkan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 1 dan indikator kinerja 1 antara lain:

a. Pelaksanaan Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Kegiatan riset dan kajian yang telah dilaksanakan PRKOM dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan 1 dan Indikator Kinerja 1 antara lain:

1. Kajian Peredaran Obat- Obatan yang sering disalahgunakan

Kajian Peredaran obat obat yang disalahgunakan ini adalah kajian yang bertujuan untuk memperoleh data profil peredaran dan penggunaan obat-obat yang sering disalahgunakan dan mengetahui berapa real peredaran dan penggunaannya. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dan laporannya telah disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk ringkasan eksekutif. Laporan hasil riset dan kajian dalam bentuk buku juga telah dicetak dan diperbanyak.

2. Pengukuran IKU BPOM 2020

Kegiatan pengukuran IKU BPOM ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja BPOM setiap tahunnya, ada 4 indikator kinerja BPOM yang diukur dalam satu kegiatan ini antara lain:

- a) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
- b) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu,
- c) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan,
- d) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan pengukuran IKU BPOM ini telah selesai dilaksanakan dan hasil indeks masing masing telah diinformasikan kepada unit kerja dan UPT diliingkungan BPOM.

3. Kajian Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Implementasi Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 terkait Fungsi dan Tugas Badan POM terhadap Efektivitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan. Kajian ini telah selesai dilaksanakan dan ringkasan eksekutif dari kegiatan ini telah disampaikan kepada pimpinan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Efektivitas Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2017, dilaksanakan *Forum Group Discussion* dan *Indepth Interview* kepada beberapa instansi terkait yang dihadiri oleh Dr. Syam Surya Syamsi dan Bapak Yanto sebagai fasilitator serta Pakar Ahli dari Universitas Indonesia, tim peneliti PRKOM, dan 10 orang narasumber dari 10 instansi terkait dengan Inpres ini.

4. Survei Persepsi Lintas Sektor Terhadap Program Keamanan Pangan Nasional

Survei ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program keamanan pangan yang dilaksanakan oleh kedeputian III BPOM. Survei ini telah selesai dilaksanakan dan ringkasan eksekutif dari kegiatan ini telah disampaikan kepada pimpinan

5. Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan.

Kajian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap proses registrasi BPOM, menemukan faktor yang dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan menemukan faktor dalam pemahaman pelaku usaha yang paling berpengaruh pada permintaan data tambahan dan mundurnya *timeline* serta kinerja pelayanan public dalam hal ini registrasi Pangan Olahan. Riset ini telah selesai dilaksanakan dan ringkasan eksekutif dari kegiatan ini telah disampaikan kepada pimpinan.

6. Kajian Peningkatan Efektifitas Implementasi Penerapan CPOTB bertahap oleh UMKM Obat Tradisional

Kajian ini dilaksanakan guna mengetahui efektifitas penerapan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) bertahap dalam Perka BPOM No.26/2018 terhadap Proses dan Output Produk UMKM OT, sehingga dapat mendukung UMKM OT Berdaya Saing. Pelaksanaan kegiatan ini berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan OT SK dan Kos Kedeputian II. Kajian ini telah selesai dilaksanakan dan ringkasan eksekutif dari kegiatan ini telah disampaikan kepada pimpinan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian peningkatan Implementasi Kebijakan CPOTB

Bertahap terhadap UMKM Obat tradisional, dilaksanakan Forum Group Discussion dan Indepth Interview kepada beberapa UMKM yang dihadiri oleh Dr. Syam Surya Syamsi dan Bapak Yanto sebagai fasilitator serta Pakar Ahli dari Universitas Indonesia, tim Peneliti PRKOM, dan 9 Narasumber perwakilan UMKM.

7. Kajian Keamanan Pangan *Indonesia Risk Assessment Center* (INARAC)

Kajian INARAC merupakan kegiatan utama yang wajib dijalankan PRKOM sebagai unit sekretariat INARAC. Kegiatan ini berisi berbagai kajian yang mengkaji mengenai kandungan berbahaya pada produk pangan yang beredar. Judul kajian tahun ini antara lain:

- a) Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Pangan Olahan Diet Khusus untuk Bayi dan Anak Di Indonesia
- b) Kajian Profil Risiko Mikroplastik pada Air Minum Dalam Kemasan
- c) Scientiic Opinion Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Minyak Sawit
- d) Policy Brief Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Minyak Sawit.

Kajian ini telah selesai dilaksanakan dan ringkasan eksekutif dari kegiatan ini telah disampaikan kepada pimpinan.

Kegiatan diatas merupakan kegiatan utama dan prioritas PRKOM dalam mencapai indikator dilevel internal proses dan level customer perspektif. Seluruh kegiatan diatas dapat diselesaikan tepat waktu. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilalui dengan berbagai inovasi dan solusi serta komitmen yang tinggi dari pimpinan. Untuk Ringkasan Eksekutif Kegiatan Riset dan Kajian yang dilakukan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Forum Konsultasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Kegiatan Forum Konsultasi Riset dan Kajian pada tanggal 11 Desember 2020 Kepala PRKOM menyampaikan bahwa forum ini merupakan forum konsultasi riset dan kajian, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu wadah untuk mendiskusikan rencana riset dan kajian Obat dan Makanan ke stakeholder internal terkait Obat dan Makanan, sehingga rencana riset dan kajian bisa tepat arah dan tepat guna, dan nantinya bisa dimanfaatkan dan memperoleh masukan dan inovasi riset dan kajian, juga meningkatkan kerjasama antar unit kerja di lingkungan Badan POM. Sebagaimana arahan dari Kepala Badan POM, bahwa Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan melaksanakan riset yang mempunyai nilai strategis, bersifat makro kemudian lintas komoditi dan tergantung kebutuhan untuk penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Pada forum ini dihadiri oleh Dr. Muhamad Dimiyati dari BRIN yang akan menyampaikan materi “Arah Kebijakan Riset Nasional”, Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dari Kemenkes yang akan menyampaikan materi “Isu Strategis

Kebijakan Kesehatan, Bapak Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, PhD dari Kementerian PPN / BAPPENAS yang akan menyampaikan materi “Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Untuk Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, Drs. Anthonius Malau, M.Si dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan menyampaikan materi “Perdagangan melalui Sistem Elektronik-Peran dan Tantangan Lembaga Pengawas. Selain itu juga di disampaikan beberapa rencana pelaksanaan Riset dan Kajian yang akan dilaksanakan tahun 2021 antara lain : “Pengkukuran Kinerja Utama BPOM” disampaikan oleh Sri Astuti, S.Si, M.Farm, “Riset Baseline Data dan Pengembangan Metodologi Sampling” yang disampaikan oleh Dr. Rina Adriany, Apt., M.Si, “Analisis Kebijakan POM untuk Penerapan UU Cipta Kerja” yang disampaikan oleh Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, M.Ti, “Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan di Masa Pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Dra. Sri Murhandini, Apt., M.Phil, “Riset dan Kajian Obat dan Makanan dalam Mendukung MDGs-Kajian Pengendalian Resistensi Antimikrobial” yang disampaikan oleh Priharika Septyowati, S.Si, Apt., M.KM. Pada Forum ini hadir sebagai penanggung materi adalah Prof. Dr. Dra. Sri Suryawati, Apt, dari UGM, Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, DEA, Apt dari UGM, Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc, dari IPB, Riati Anggraeni, SH, MARS, M.hum, Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, dan Drs, Safriansyah, Apt., M.Kes. dari Badan POM. Pada forum ini dihadiri peserta dari Unit-unit Kerja di Badan POM, baik hadir secara luring maupun daring dan forum ini akan dibuka oleh Ibu Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai Pembina Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

2

SASARAN KEGIATAN 2

TERSEDINYA RISET DAN KAJIAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA 2

Persentase Riset dan Kajian yang Sesuai dengan Kebutuhan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 2 dan indikator kinerja 2 adalah

a. Rapat pertemuan penyusunan Rencana Induk Riset (RIR)

Kegiatan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Induk Riset (RIR) tahun 2020 – 2024, yang bersinergi dengan dokumen Rencana Strategis Badan POM dan Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 2020-2024. Dalam penyusunan dokumen RIR ini memperhatikan masukan dari Kedeputian

di BPOM dan isu internal serta global yang berkembang saat ini. RIR diharapkan memberikan kejelasan arah pelaksanaan Riset dan Kajian Obat dan Makanan tahun 2020-2024 sehingga tumpang tindih riset dan kajian diinternal Badan POM dapat dihindari serta mampu meningkatkan koordinasi lintas unit yang telah ada selama ini.

Peyusunan RIR dilakukan dengan rapat-rapat dengan mengundang narasumber dari eksternal maupun pakar dari kementerian Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

3

SASARAN KEGIATAN 3

TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN RISET DAN KAJIAN YANG SESUAI PEDOMAN RISET DAN KAJIAN DAN KESESUAIAN DENGAN TIMELINE

INDIKATOR KINERJA 3

Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Riset dan Kajian dengan Pedoman Riset dan Kajian dan Kesesuaian dengan Timeline

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :

a. Rapat Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Riset dan Kajian

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil Riset/Kajian dilingkungan BPOM baik berupa data Riset/Kajian ataupun karya tulis ilmiah, BPOM dirasa perlu menetapkan Pedoman Riset dan Kajian. Pedoman ini memuat secara jelas persyaratan maupun kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu Riset/Kajian Obat dan Makanan agar hasil yang didapat lebih berkualitas dan memiliki daya ungkit dan kemanfaatan yang besar bagi kebutuhan organisasi.

Penyusunan pedoman ini dilakukan melalui rapat-rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Pusat Riset dan Kajian dan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman dibentuk Tim Penilai yang dutetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang terdiri dari perwakilan dari tiap-tiap bidang sebanyak 6 (enam) orang. Penilaian dilakukan setiap triwulan.

b. Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan

Untuk melihat keberhasilan pengelolaan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan riset dan kajian yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja untuk mencari strategi yang akan dilakukan sehingga riset dan kajian dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah di targetkan

Rapat monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan dihadiri oleh Kepala Bidang dan kepala Subbagian Tata Usaha.

c. Evaluasi Kinerja

Pada tanggal 3 – 5 Desember 2020, PRKOM Melaksanakan Evaluasi Kinerja yang bertema “Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja”. Dalam upaya peningkatan kinerja PRKOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dalam menyikapi cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berperan penting sebagai *support* dalam pelaksanaan setiap Kegiatan Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PRKOM. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan Evaluasi Kinerja PRKOM akan mengangkat tema “Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja”. Acara di buka oleh Sekretaris Utama BPOM (Dra. Elin Herlina, Apt., M.P) serta Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan (Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes) selaku pembina PRKOM sekaligus menyampaikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja PRKOM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadikan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dapat lebih meningkatkan Kinerja PRKOM untuk kedepannya dan akan mendapat informasi atau Pengetahuan baru dari apa yang dipaparkan pada Narasumber.



Gambar7. Evaluasi Kinerja “Penerapan Sistem Informasi dalam Mempercepat Kinerja”

d. Penerapan Sistem Mutu

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen kualitas. Sertifikasi ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan-persyaratan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang/jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Standar Internasional ISO.

- **Kaji Ulang Dokumen**

Kegiatan Kaji Ulang Dokumen merupakan bagian dari sistem mutu untuk menunjang kegiatan riset Obat dan Makanan. Kaji ulang adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian dan pemutakhiran dokumen mutu dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran. Dokumen hasil kaji ulang digunakan sesuai dengan sistem yang telah disepakati.

Kaji ulang dokumen meliputi :

- 1) Hasil audit internal dan eksternal
- 2) Umpan balik pelanggan
- 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk
- 4) Status tindakan pencegahan dan perbaikan
- 5) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
- 7) Rekomendasi untuk peningkatan
- 8) Pembahasan SOP Mikro

- **Rapat Tinjauan Manajemen**

Tinjauan Manajemen merupakan kegiatan yang tercantum dalam 12 klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020. Dari hasil RTM ini direkomendasikan Finalisasi Rencana Induk Riset, Penilaian Kompetensi Teknis, Finalisasi Standar Pelayanan Publik PRKOM, Penyesuaian SK Tim RB dan Menyusun Rencana Kerja Tim/Pokja, Kesepakatan Timeline Penyampaian Pelaporan Hasil Riset dan Kajian, Perlu dibuat jadwal Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan pada SOP Pengembangan Kompetensi, Pembahasan dan Evaluasi lebih lanjut Hasil Kepuasan Pelanggan Tahun 2019 perlu ditambahkan alur penyerahan barang ke Pengelola BMN pada SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

- **Audit Internal**

Audit Mutu Internal dilakukan untuk menentukan efektifitas dari penerapan sistem yang digunakan. Audit Internal dilakukan secara obyektif. Audit internal ini bertujuan untuk mengarahkan pencapaian sasaran, menemukan peluang perbaikan sehingga riset dan kajian yang dilakukan sesuai dengan sistem yang diterapkan secara efektif. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Mei 2020 oleh Tim Audit Internal PRKOM

- **Audit Eksternal**

Pada tanggal 25 Agustus PRKOM melaksanakan Audit QMS ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh auditor eksternal dari TUV Rheinland Kegiatan audit surveilan dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit survailance bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya; 2) Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar. Hasil audit QMS 9001: 2015 atas PRKOM yaitu mendapat sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

- **Audit Operasional Inspektorat**

Audit Operasional dilaksanakan di PRKOM pada 9 November – 22 Desember 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat I BPOM bertujuan (1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian sasaran, (2) Menilai ketaatan auditan terhadap peraturan yang berlaku, (3) Menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis, (4) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sasaran Audit yang dilaksanakan dititikberatkan pada operasional Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan pelaksanaan kebijakan pada semua yang dibuat oleh berbagai tingkat manajemen di lingkungan Badan POM maupun Kebijakan Pemerintah.

Ruang Lingkup Audit Operasional mencakup pelaksanaan program dan Kegiatan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan beserta pertanggungjawaban keuangan atas dana DIPA Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2020. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah.



SASARAN KEGIATAN 4
DISEMINASI HASIL RISET DAN KAJIAN OPTIMAL

INDIKATOR KINERJA 4
Nilai Kualitas Publikasi Hasil Riset dan Kajian

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kinerja 4 dan indikator 4 adalah

a. Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 4 PRKOM melaksanakan Kegiatan Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan pada tanggal 10

Desember 2020. Forum diseminasi ini dibuka oleh Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.KM selaku Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Forum ini bertujuan dalam mendiseminasikan hasil kajian riset dan kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan pada tahun 2019 lalu. Acara Forum Diseminasi Hasil Riset dihadiri oleh perwakilan dari Unit Pusat Badan POM, serta Balai Besar/Balai dan Loka POM di seluruh Indonesia, baik hadir secara luring ataupun daring. Pada acara pembukaan ini, Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyampaikan bahwa acara Diseminasi Hasil Riset ini adalah acara rutin PRKOM yang diselenggarakan setiap tahun dengan agenda penyampaian hasil riset tahun sebelumnya (2019). Pada sambutannya KaPROM berharap supaya hasil riset dan kajian dapat berguna untuk peningkatan pengawasan Obat dan Makanan khususnya untuk membantu pengambilan keputusan kebijakan di Pusat ataupun di daerah. Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu. Salah satu isu internal yang dapat mempengaruhi sasaran dan kinerja Badan POM adalah masih lemahnya dukungan riset dan kajian dalam mendukung keputusan dan implementasi kebijakan, oleh karena itu untuk menjamin bahwa kebijakan, regulasi, standar, yang dibuat oleh Badan POM mempunyai kualitas yang baik, maka perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat yang mampu menangkap perubahan lingkungan strategi, sehingga bisa memberikan perubahan rekomendasi terhadap Badan POM.



Gambar 8. Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan

b. Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral bagi suatu instansi riset terutama yang didanai oleh publik/pemerintah maka diperlukan upaya untuk memilih, mengekstrak, menyitir, dan merangkum bagian hasil riset serta membagikan kepada publik dalam bentuk yang sesuai. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan SDM BPOM dalam menulis dan melakukan publikasi artikel ilmiah khususnya membekali peserta dengan pengetahuan dasar yang perlu diketahui ketika dalam tahap persiapan menulis artikel ilmiah, melakukan pengolahan data dan menyajikan informasi misalnya dalam bentuk publikasi ilmiah.

Kemampuan peserta dalam tahap persiapan penulisan artikel ilmiah, yaitu terkait *writing for peer-reviewed journals, literature searching and assessment, plagiarism, paraphrasing, referencing and bibliography*. Pelatihan Penulisan ilmiah dilaksanakan 3 Tahap, yang dilaksanakan adalah :

Tabel 6. Pelatihan Penulisan Ilmiah

No	Pelatihan	Tanggal pelaksanaan	Peserta
1	Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah Tahap 1	27-29 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Irhamahayati 2. Tiur Dina Waty 3. Novi Pusparini 4. Elsadora Reapina 5. Sri Nurhayati 6. Leni Ranty 7. Sri Astuti 8. Fairuz Murti 9. Indah Widianingrum 10. Indah Ratnasari 11. Dedeh Endawati 12. Radi Riadi 13. Andrea 14. Agatha Novita Ika Hayuningtyas, 15. Astini Riani
2	Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah Tahap 2	10-13 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indah Widianingrum (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan) 2. Indah Ratnasari (Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor ONPPZA) 3. Dedeh Endawati (Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor ONPPZA) 4. Radi Riadi (Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) 5. Andrea (Biro Hukum dan Organisasi) 6. Agatha Novita Ika Hayuningtyas (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan) 7. Astini Riani (Direktorat Standarisasi OT, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan) 8. Irhama Hayati 9. Tiurdinawaty 10. Novi Pusparini 11. Elsadora Reapina 12. Sri Nurhayati 13. Leni Ranty 14. Sri Astuti 15. Fairuz Murti, 16. Dwi Ratnasari

3	Pelatihan Penulisan dan Publikasi Ilmiah Tahap 3	16-17 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khusnul Khotimah 2. Priharika Septyowati 3. Fairuz Murti 4. Tina Wikara 5. Dwi Ratnasari 6. Rian Kurniawan 7. Sri Astuti 8. Dyah Larasinta 9. Romanudin Nanang M 10. Evi Ratna Sari 11. Sri Nurhayati 12. Tofa Apriansyah 13. Novi Pusparini 14. elsadora reapina malthaputri 15. Leni Ranty 16. Irhamahayati 17. Eva Nikastri 18. Sri Murhandini 19. Rotua Uli Carolina Simanjuntak, 20. Tiur Dina Waty 21. Rianita Pambukowati 22. Keke Riskynta Angkat 23. Nendy Septi Arniva 24. Alinda Aprilia 25. Ayu Prihatin Dian Lestari 26. Kuntum Khairu Ummah 27. M. Zakaria
---	--	---------------------	---

c. Publikasi Ilmiah

Untuk menginformasikan hasil riset dan Kajian Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan kepada masyarakat ilmiah dan memberi kesempatan kepada Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) PRKOM dalam pengembangan profesi, maka hasil riset dapat dipublikasikan dalam bentuk makalah poster dan makalah oral pada seminar ilmiah nasional dan Internasional. Publikasi yang dilakukan PRKOM sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Publikasi Ilmiah Pegawai PRKOM

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS /AUTHOR	JUDUL RISET DAN KAJIAN YANG DIPUBLIKASIKAN	BENTUK PUBLIKASI	LINGKUP PUBLIKASI
1	<i>The Covid-19 Pandemic Impact on Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Traditional Medicines Practices in Indonesia: Policy and Strategy</i>	Leni Ranty,Rina Adriany, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, Eka Rusmawati, Kuntum Khairu Ummah	Kajian Efektivitas Implementasi Kebijakan CPOTB Bertahap terhadap UMKM Obat Tradisional	Presentasi	Internasional
2	<i>Asessing organization readiness in implementing flexible working arrangement in the new normal era : in case of public sector in Indonesai</i>	Irhamahayati	Kajian Keamanan Obat dan Makanan	Presentasi	Internasional

3	Signifikansi Budaya Organisasi dalam implementasi Reformasi Birokrasi	Sri Nurhayati	Kajian Keamanan Obat dan Makanan	Tulisan ilmiah populer	Internal
4	<i>Consumption of Traditional Medicine among Indonesian young generation: it is just a tradition or a rational-based behavior</i>	Irhamahayati, Leni Ranty, Astini Riani, Dwi Ratnasari	Kajian Efektifitas Implementasi Kebijakan CPOTB Bertahap terhadap UMKM OT	Artikel ilmiah	Nasional
5	<i>Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)</i>	Eva Nikastri	Kajian Keamanan Pangan INARAC	Presentasi	Nasional
6	Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar	Bidang Obat	Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar	Presentasi	Nasional
7	Studi Hubungan Antara Konsumsi Minuman Berenergi Terhadap Gagal Ginjal Di Indonesia	Bidang OTSKKOS	Studi Hubungan Antara Konsumsi Minuman Berenergi Terhadap Gagal Ginjal Di Indonesia	Presentasi	Nasional
8	Kajian Dampak Ekonomi Peredaran Produk Obat Ilegal 2019	Bidang Obat	Kajian Dampak Ekonomi Peredaran Produk Obat Ilegal 2019	Presentasi	Nasional
9	Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan	Bidang OTSKKOS	Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan	Presentasi	Nasional
10	Kajian Implementasi Kebijakan Pemasukan Post Border Terhadap Pengawasan Obat dan Makanan	Bidang Pangan	Kajian Implementasi Kebijakan Pemasukan Post Border Terhadap Pengawasan Obat dan Makanan	Presentasi	Nasional
11	<i>Policy Brief</i> Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE pada Produk Minyak Sawit	Dewi Afriani/ Eva Nikastri	<i>Policy Brief</i> Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE pada Produk Minyak Sawit	Makalah	Nasional
12	<i>Scientific Opinion</i> Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE pada Produk Minyak Sawit	Dewi Afriani / Eva Nikastri	Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE pada Produk Minyak Sawit	Makalah	Nasional
13	<i>Food Safety Risk Assessment in Indonesia Conducted by Indonesia Risk Assessment Center</i>	Eka Purnamasari / Eva Nikastri	Kajian Keamanan Pangan INARAC	Presentasi	Internasional

14	<i>Narrative Analysis: Pelayanan dan Pengawasan Paket Ekonomi</i>	<i>Policy Trade-Off dan Pasca Kebijakan</i>	Tofa Apriansyah	Kajian Implementasi Peraturan BPOM No. 29 dan 30 Tahun 2017 terkait Pengawasan Post Border	Artikel ilmiah	Nasional
15	<i>Canvas Innovation on Delivery Control</i>	<i>Model</i>	Tofa Apriansyah	Kajian Implementasi Peraturan BPOM No. 29 dan 30 Tahun 2017 terkait Pengawasan Post Border	Artikel ilmiah	Internasional
16	<i>The Covid-19 Pandemic Impact on Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Traditional Medicine Practices in Indonesia: Policy and Strategy</i>		Leni Ranty, Rina Adriany, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, Eka Rusmawati, Kuntum Khairu Ummah	Kajian Efektivitas Implementasi Kebijakan CPOTB Bertahapa Terhadap UMKM Obat Tradisional	Presentasi	Internasional

SASARAN KEGIATAN 5

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUP PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN YANG OPTIMAL

5

INDIKATOR KINERJA 5

Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA 6

Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan ini adalah

a. Workshop Penguatan Nilai-nilai RB

Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2020 diselenggarakan oleh PRKOM pada tanggal 26 – 28 Februari 2020 yang dihadiri oleh seluruh staf PRKOM, 2 (dua) personil dari Balai Besar POM di Bandung, serta mengundang narasumber Bapak Yuliandri Rahadiyanto, S.IP, M.Si dan Bapak Ginansah Munggaran dari BAPPELITBANG Kota Bandung dan Bapak Arif dari KemenpanRB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terus berupaya melakukan penguatan nilai-nilai Reformasi Birokrasi di PRKOM. Kegiatan berlangsung selama tiga hari pada tanggal 26 – 28 Februari 2020 Hotel Aston Braga, Bandung.

b. Mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Kinerja

Workshop penyusunan Laporan Kinerja merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 10-11 Februari 2021. PRKOM mengikuti workshop tersebut untuk memastikan bahwa laporan kinerja yang disusun oleh PRKOM memenuhi kaidah dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Pedoman SAKIP Badan POM. Dalam acara tersebut hadir narasumber dari kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian PAN dan RB untuk memandu seluruh Satuan Kerja dilingkungan Badan POM untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam acara tersebut PRKOM telah melakukan *desk draft* Laporan Kinerja PRKOM 2020 untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja PRKOM sesuai dengan ketentuan. Rapat Pembahasan Laporan Kinerja ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

c. Melakukan Assessment terhadap SAKIP dan RB

Unit kerja dilingkungan Badan POM setiap tahun dilakukan penilaian terhadap implementasi SAKIP dan RB di lingkup unit eselon II. Melalui Tim SAKIP dan Tim RB PRKOM yang telah ditetapkan oleh Kepala PRKOM. Penilaian ini dilakukan secara berlapis melalui *selfassessment* unit kerja kemudian desk dengan Inspektorat BPOM kemudian verifikasi tim penilai Internal dan kemudian penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PRKOM menyusun Laporan kinerja dengan rapat yang diikuti oleh Kepala PRKOM, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian TU, dan Tim SAKIP. Sebelum melakukan penyusunan Laporan Kinerja, PRKOM menetapkan tim pengelola akuntabilitas melalui Surat Keputusan Kepala PRKOM nomor HK.02.02.84.844.01.21.47 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Penyusunan Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh satuan kerja dilingkungan Badan POM. Rencana Strategis ini digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah. PRKOM telah berproses menyusun rencana strategis sejak tahun 2019 dan telah disahkan pada bulan Mei tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan HK.02.02.84.844.05.20.47 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Maka

nan Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis PRKOM melibatkan Kepala PRKOM, Kepala Bidang, Sub Bagian TU dan Tim Penyusun Renstra.



SASARAN KEGIATAN 6
TERWUJUDNYA SDM PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN YANG BERKINERJA OPTIMAL

INDIKATOR KINERJA 7
Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kinerja 6 dan indikator kinerja 7 adalah :

a. Pelatihan *In House training*

In House Training merupakan program pelatihan yang diselenggarakan secara internal oleh kelompok kerja yang ditetapkan sebagai penyelenggara. Pelatihan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Jaminan kualitas/mutu riset dan kajian sangat ditentukan oleh kompetensi peneliti. Terkait dengan tupoksi PRKOM pasca restrukturisasi, pengembangan kompetensi SDM harus terus dilakukan secara bertahap untuk mengisi kesenjangan kompetensi sebagai dampak perubahan jenis pekerjaan. Tujuan pelatihan in house training adalah untuk mengurangi kesenjangan kompetensi dalam pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif, khususnya teknik pengembangan kuesioner. *In House Training* yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 8. *In House Training*

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan <i>Regulatory Impact Assessment</i>	3 – 6 Maret 2020	1. Sri Murhandini 2. Eva Nikastri 3. Irhamahayati 4. Fairuz Murti 5. Sri Nurhayati 6. Dwi Ratnasari 7. Tiurdinawaty 8. Evi Ratna Sari 9. 9.Khusnul Khotimah 10. 10. Leni Ranty
2.	Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif	1-3 April 2020	1. Lince Yarni 2. Eka Rusmawati

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Novi Pusparini 4. Sri Astuti 5. Mastiur Hutagaol 6. Dewi Afriani 7. Tina Wikara 8. Fairuz Murti 9. Kuntum Khairu Ummah 10. Neni Anggraini
3.	Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif	06-10 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rina Adriany 2. Sri Murhandini 3. Priharika Septyowati 4. Eka Rusmawati 5. Tiurdinawaty 6. Dra. Lince Yarni 7. Tina Wikara 8. Sri Astuti 9. Elsadora Reapina Malthaputri 10. Dewi Afriani 11. Mastiur Hutagaol 12. Leni Ranty 13. Novi Pusparini 14. Fairuz Murti, SKM 15. Rotua Uli Carolina Simanjuntak 16. Dwi Ratnasari 17. Laila Krishenur Fitri 18. Ilaine Audia 19. Ayu Prihatin Dian Lestari 20. Kuntum Khairu Ummah
4.	Pelatihan Pembuatan <i>Policy Brief</i>	24-31 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rina Adriany 2. Priharika Septyowati 3. Sri Murhandini 4. Irhamahayati 5. Lince Yarni 6. Eka Rusmawati 7. Dewi Afriani 8. Sri Astuti 9. Leni Ranty 10. Fairuz Murti 11. Evi Ratna Sari 12. Dwi Ratnasari 13. Rotua Uli Carolina Simanjuntak 14. Sri Nurhayati. 15. Fadjar Aju Tofiana 16. Yosua Halasan P Panjaitan 17. Arham Sukardi 18. Nani Mardiah 19. Dara Lextiany Putri 20. Neti Triwinanti 21. Yoandra Hilmawan 22. Ryan Amdiar 23. Adhika Primananda 24. Trisna Priyadi

5.	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	14 Juli 2020	Seluruh Pegawai PRKOM
6.	Sosialisasi Budaya PIKKIR	27 Juli 2020	Seluruh Pegawai PRKOM

b. Mengikuti Pelatihan - Pelatihan di Lembaga Pelatihan

Sebagai salah satu upaya pengelolaan ASN untuk menjaga kinerja dan kompetensi ASN Badan Pengawas Obat dan Makanan. PRKOM merasa perlu mengembangkan kompetensi pendukung dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan, hal tersebut sebagai upaya dalam mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan kinerja dan kompetensi pegawai agar dapat memberikan kinerja yang optimal. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal, diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjang baik dalam mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan yang terkait dengan pekerjaan, ataupun aspek lain yang tidak terkait langsung untuk menunjang kinerja pegawai dan pada akhirnya kinerja organisasi. Pelatihan yang dilaksanakan di lembaga pelatihan sebagai berikut:

Tabel 9. Pelatihan di Lembaga Pelatihan

No	Pelatihan	Tanggal pelaksanaan	Lembaga Pelatihan/ Penyelenggara	Peserta
1	Pelatihan pemutahiran data BMN semester II (dua) dan tahunan 2019	21-24 Januari 2020	Biro Umum dan SDM	Setyaningsh
2	Pelatihan penyusunan laporan keuangan BPOM TA 2019	27-Jan-2020 s.d 01 Februari 2020	Biro Perencanaan dan Keuangan	Setyaningsih
3	Bimtek SAKIP dan Monev Online	05-07 Februari 2020	Biro Perencanaan dan Keuangan	1.Eva Nikastri, 2.Tiurdinawati, 3.Romanudin N M
4	Seminar International Forum on 3-MCPD and GE	07 Februari 2020	Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	Dewi Afriani
5	Pelatihan Graphic Design Tingkat Dasar Angkatan I Tahun 2020	10-15 Februari 2020	Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)	Rian Kurniawan

6	Bimtek Sertifikasi CPOTB	11-14 Februari 2020	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Leni Ranty
7	Pelatihan webinar Pengujian Covid	Maret-April	LIPI, Balitbangkes, WHO, IACC dan Roche	Eva Nikastri
8	Webinar Kit Cerdas Selamat	11-Jun-20	PT. Muzanni Lestari	Tiurdinawaty
9	Pelatihan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti Empiris	13-14 Juli 2020	Indonesian Institute for Public Governance	Tiurdinawaty
10	Training Data Science	10-14 Agustus 2020	PUSILKOM UI	Irhamahayati
11	Bimbingan Teknis Penghitungan Angka Kredit JFAK Angkatan 1	07-08 September 2020	LAN	Irhamahayati

c. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat PSDM secara Webinar

Webinar yang diselenggarakan oleh PPSDM menjadi salah satu sumber belajar bagi pegawai selama pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini menjadi sarana yang dapat diusahakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Pegawai dapat mengikuti Webinar dan duduk bersama sembari berdiskusi secara langsung dengan pemateri. PPSDM berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi secara online untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPOM dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi BPOM, serta mengakomodir kebutuhan pembelajaran SDM Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan yang dilaksanakan oleh PPSDM dan diikuti oleh pegawai PRKOM sebagai berikut

Tabel 10. Pelatihan yang dilakukan oleh PPSDM

No	Pelatihan	Tanggal pelaksanaan	Peserta
1	Training For Trainer - Supervisor Development Program	17,19,21 Februari 2020	Irhamahayati
2	Capacity Building Agent of Change	10-12 Maret 2020	Rian Kurniawan,
3	Sosialisasi RB Online "Membangun Zona Integritas BPOM"	30/04/2020	1. Priharika Septyowati 2. Laila Udhiyyah
4	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan "Coaching dan Mentoring Kepegawaian"	04-Mei-20	Sri Nurhayati

5	Sosialisasi RB Online, "Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Manajemen Perubahan dan Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM"	05-Mei-20	Priharika Septyowati
6	Seminar Online Transformational Leadership	05-Mei-20	Sri Nurhayati
7	Sosialisasi Online Reformasi Birokrasi Penataan Organisasi dan Kelembagaan BPOM	06-Mei-20	Tiurdinawaty
8	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Online materi Mengelola perubahan	08-Mei-20	1. Tiurdinawaty 2. Sri Nurhayati
9	Seminar Online POAC / PDCA dalam Manajemen Organisasi	11-Mei-20	1. Irhamahayati 2. Romanudin N M 3. Tina Wikara 4. Tiurdinawaty
10	Sosialisasi RB Online "Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penataan SDM Aparatur BPOM"	12-Mei-20	1. Eka Purnamasari, 2. Tina Wikara 3. Atha Qatrunnada
11	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Online materi Membangun Integritas Tim	13-Mei-20	1. Tina Wikara 2. Novi Pusparini 3. Laila Uddhiyyah
12	Sosialisasi Online Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penataan Tata Laksana BPOM	14-Mei-20	Tiurdinawaty
13	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Online materi Pengambilan Keputusan	18-Mei-20	1. Eka Purnamasari, 2. Sri Murhandini 3. Priharika Septyowati
14	Sosialisasi Online Reformasi Birokrasi Peningkatan Akuntabilitas BPOM	19-Mei-20	1. Eka Purnamasari, 2. Romanudin N M 3. Laila Uddhiyyah 4. Tina Wikara
15	Sosialisasi Online Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan BPOM	20-Mei-20	Eka Purnamasari
16	Sosialisasi Online Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM	02-Jun-20	1. Intan Anindhika H 2. Dewi Afriani 3. Novi Pusparini 4. Laila Uddhiyyah
17	Sosialisasi Online Aplikasi SIMPONI	02-Jun-20	1. Renny Anggraeni 2. Atha Qatrunnada 3. Evi Ratna sari 4. Rian Kurniawan 5. Sri Nurhayati 6. Tina Wikara

18	Sosialisai Online Reformasi Birokrasi Program, kegiatan, target dan indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Publik BPOM	04-Jun-20	Rian Kurniawan
19	Sosialisasi RB Online Program, kegiatan dan indikator kinerja pelayanan publik BPOM	04-Jun-20	1. Irhamahayati 2. Rian Kurniawan
20	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Online materi "All Manager is HR Manager Seminar Online"	08-Jun-20	Eka Purnamasari
21	Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Online materi Pengembangan Diri dan Orang Lain	09-Jun-20	1. Renny Anggraeni 2. Rian Kurniawan 3. Setyaningsih
22	Seminar Online "Building the New Organization DNA for Post-Covid-19 Recovery"	10-Jun-20	1. Dewi Afriani 2. Sri Nurhayati 3. Tina Wikara
23	Seminar Online "Kolaborasi antar Generasi dalam Organisasi"	11-Jun-20	Dyah Larasinta
24	Pengembangan kompetensi pengelolaan diri dan orang lain dengan tema "Coaching for Mellenials"	15-Jun-20	1. Intan Anindhika H 2. Rian Kurniawan
25	Pengembangan Kompetensi pengelolaan diri dan orang lain dengan tema "Coaching for Leader"	16-Jun-20	Eka Purnamasari
26	Seminar Online "Komunikasi dan Negoisasi"	17-Jun-20	1. Dyah Larasinta 2. Setyaningsih 3. Renny Anggraeni
27	Webinar Pengembangan Kompetensi Komunikasi dan Pelayanan Publik	18-Jun-20	1. Sri Nurhayati 2. Dyah Larasinta
28	Sosialisasi Jurnal Ilmiah Pengawasan Obat dan Makanan	19-Jun-20	Dewi Afriani
29	Pengembangan kompetensi inovasi dan creative thinking dengan tema "Creative and Innovative Thinking"	22-Jun-20	1. Tina Wikara 2. Novi Pusparini 3. Setyaningsih 4. Intan Anindhika
30	Seminar Online "Result Orientation Management"	23-Jun-20	1. Tina Wikara 2. Romanudin N M
31	Pengembangan kompetensi inovasi dan creative thinking dengan tema "Membangun Ekosistem Inovasi dalam Organisasi"	24-Jun-20	Romanudin Nanang Mulyanto
32	Seminar Online Manajemen Bisnis Obat dan Makanan di Indonesia	25-Jun-20	1. Eka Purnamasari, 2. Khusnul Khotimah,
33	Webinar Pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja	29-Jun-20	1. Eka Purnamasari,

	dengan tema "Manajemen Waktu"		2. Sri Nurhayati TinaWikara
34	Webinar Membangun Corporate Culture berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Organisasi	01-Jul-20	Dewi Afriani
35	Seminar Online Berdamai dengan New Normal, Manajemen SDM ditengah Covid-19	02-Jul-20	Dyah Larasinta
36	Bimbingan Teknis Perkembangan HR Management dan Implementasinya di Sektor Publik	06-Jul-20	Ellen Simanjuntak
37	Peran Pengelola Kepegawaian BPOM dalam Manajemen SDM BPOM	09-Jul-20	Ellen Simanjuntak
38	Webinar Pengembangan Kompetensi Inovasi dan Creative Thinking	13-Jul-20	Tina Wikara
39	Manajemen Stress, pengelolaan kinerja dibawah tekanan	14-Jul-20	1. Ellen Simanjuntak 2. Dewi Afriani 3. Laila Udhiyyah 4. Renny Anggraeni 5. Intan Intan 6. Anindhika Hastari 7. Dyah Larasinta
40	Seminar Online Personal Management	15-Jul-20	1. Dewi Afriani 2. Renny Anggraeni 3. Tati Kartati
41	Webinar dengan tema "Managing Your Boss"	16-Jul-20	1. Setyaningsih 2. Renny Anggraeni
42	Seminar Online Buildings Initiative For Professional At Work	20-Jul-20	Dewi Afriani
43	Seminar Online Pengelolaan aset data/ informasi /pengetahuan di era revolusi industri 4.0	21-Jul-20	1. Setyaningsih 2. Atha Qatrunnada
44	Manajemen Aset Tangible dan Intangible di era revolusi industri 4.0	22-Jul-20	1. Setyaningsih 2. Dyah Larasinta
45	eminar Online Manajemen Konflik Antar Generasi di Tempat Kerja	27-Jul-20	Tati Kartati
46	Pelatihan Asesor Kompetensi Teknis Tahun 2020 sebagai Asesor Madya Fungsi Riset	27 Juli s.d 30 Juli 2020	Priharika Septyowati
47	Seminar Online Modern Office Management And Filing System	29-Jul-20	1. Setyaningsih 2. Dyah Larasinta
48	Arsip Digital: Kewajiban atau Pilihan?	30-Jul-20	1. Setyaningsih 2. Dyah Larasinta
49	Workshop Bridging Competency - Publikasi Kajian Kebijakan	04/08/2020 s.d 06/08/2020	1. Irhamahayati 2. Tofa Apriansyah 3. Khusnul Khotimah 4. Sri Nurhayati

50	Seminar Online Pengambilan Keputusan - This way or That Way? (Sukses membuat keputusan dengan analisis data dan informasi)	05-Agu-20	Renny Anggraeni
51	Self-Learning: Why It's Essential for You in the Industry 4.0	06/08/2020	Setyaningsih
52	Seminar Online The Happiness in The Differences (Sinergisme dalam Bingkai Kebhinekaan)	13/08/2020	Renny Anggraeni
53	Integrity From Heart (How to Improve Integrity in the Workplace)	24/08/2020	Novi Pusparini
54	Webinar Manajemen Pengembangan Kinerja	28/08/2020	Atha Qatrunnada
55	Bimbingan Teknis Online dan "Coaching dan Mentoring"	25-27 Agustus 2020	Dewi Afriani
56	Workshop Bridging Competency - Publikasi Kajian Kebijakan	04/08/2020 s.d 06/08/2020	Tofa Apriansyah
57	webinar dengan topic Strategic Change Management for Sustainability Organizations	28/09/2020	Tofa Apriansyah
58	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual	12/10/2020 s.d 13/10/2020	1. Leni Ranty Novi Pusparini 2. Tofa Apriansyah
59	Bimbingan Teknis Online Communication Skills for Excellent Services	12/10/2020 s.d 14/10/2020	1. Tina Wikara 2. Khusnul Khotimah
60	Bimbingan Teknis Online : Building Trust and Keep Service Excellence	10/11/2020 sd 12/11/2020	1. Tina Wikara 2. Novi Pusparini
61	Bimbingan Teknis Online : Critical Thinking, Problem Solving and Effective Decision Making	18/11/2020 s.d 20/11/2020	Khusnul Khotimah
62	"Enjoying Life with Neuro Linguistic Programming (NLP)" (Mengelola Pikiran untuk Hidup lebih bahagia)	18/11/2020 s.d 20/11/2020	Khusnul Khotimah
63	Training Amazing You	12/12/2020 s.d 13/12/2020	1. Meilinda Eka Rusti'ani 2. Ghina Kartika 3. Kenya Lintang Wienantu 4. Widyana Siregar Martha Kusuma

d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Dalam rangka mendukung terwujudnya *world class bureaucracy* pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi yaitu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja pelayanan. PKP ini diikuti oleh Kepala Subbagian Tata Usaha mulai tanggal 03 Agustus – 20 November 2020 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi.

e. Mengikuti Pendidikan Pelatihan terkait Jabatan Fungsional

Pelatihan Fungsional, pelatihan sebagai syarat untuk duduk dalam jabatan fungsional, terdiri dari pelatihan pembentukan dan pelatihan penjurangan. Sasaran dari pelatihan fungsional adalah pegawai yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau calon pemangku jabatan fungsional yang akan diangkat pertama kali dan atau pindah jabatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional. Penyelenggaraan pelatihan fungsional ada pada instansi pembina

Tabel 11. Pelatihan Jabatan Fungsional

No	Diklat	Tanggal pelaksanaan	Peserta
1	Pelatihan Analisis Kebijakan	30/03/2020 s.d 05/05/2020	1. Fairuz Murti 2. Evi Ratna Sari
2	Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli	09/03/2020 s.d 16/06/2020	Rotua Uli Carolina Simanjuntak
3	E-learning Tingkat Dasar Jabatan Fungsional PFM	14/02/2020 s.d 21/02/2020	Rotua Uli Carolina Simanjuntak
4	Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	18/05/2020 s.d 26/08/2020	Intan Anindhika Hastari
5	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Terampil	02/03/2020 s.d 12/03/2020	Atha Qatrunnada Mardziana



SASARAN KEGIATAN 7
MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA INFORMASI PUSAT RISET
DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN YANG OPTIMAL

INDIKATOR KINERJA 8
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pusat Riset dan Kajian Obat
dan Makanan yang Optimal

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja 7 dan Indikator Kinerja 8 adalah

a. Pemanfaatan Email Corporate

Sebagai Upaya Pemanfaatan dan Peningkatan Komunikasi Kedinasan dengan Pihak Internal maupun Eksternal, PRKOM melakukan pemanfaatan email korporat (@pom.go.id) untuk mengirim disposisi

b. Pengembangan Sistem Informasi Riset

Unit Kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan sudah membangun website yang dinamakan dengan Sistem Informasi Riset sejak 2015. Sistem Informasi Riset ini menjadi domain untuk memuat informasi terkait unit kerja serta menjadi sarana publikasi kegiatan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Guna mempermudah diseminasi informasi terkait kegiatan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan serta mempermudah stakeholder dalam mengakses layanan survei yang dilakukan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tanpa terbatas jarak dan waktu maka Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Riset pada Tahun Anggaran 2020. Penyempurnaan ini juga merupakan bentuk dukungan percepatan *e-government* di Indonesia.

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Riset di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan adalah untuk pengembangan dan penyempurnaan terhadap Sistem Informasi Riset yang telah berjalan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dikemas dalam bentuk sistem aplikasi informasi secara elektronik. Secara umum pelaksanaan pekerjaan ini ditujukan untuk:

- a) Mempermudah diseminasi informasi aktivitas kinerja di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan melalui penyempurnaan dan pengembangan terhadap portal informasi terkait Unit Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Riset.

- b) Diharapkan melalui Sistem Informasi Riset, masyarakat dapat secara mandiri mencari data dan informasi yang dibutuhkannya, sekaligus memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif antara stakeholder dengan pihak pemerintah melalui Sistem Informasi ini.
- c) Sistem Informasi Riset menjadi sebuah wadah pengetahuan (knowledge portal) yang di dalamnya tidak sekedar berisi data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, namun lebih jauh lagi berisi berbagai pengetahuan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan Sistem Informasi Riset Tahun Anggaran 2020, dengan spesifikasi pekerjaan yang disepakati meliputi

- 1) Laman Utama SIR
 - a. Penambahan polling website terkait kepuasan pengunjung
Detail :
 - a) Penambahan polling website terkait kepuasan pengunjung
 - Polling berupa icon
 - Menunjukkan persentase nilai masing-masing skala
 - b. Penambahan menu control untuk admin terkait Maklumat Pelayanan
 - b) Penambahan menu control untuk admin terkait Maklumat Pelayanan
- 2) Menu Berita
 - a) Memberikan informasi mengenai kegiatan PRKOM
 - b) Sub menu Program memberikan informasi Rencana kegiatan tahun berjalan tahun 2019 – 2020
 - c) Sub menu aktifitas berupa Berita kegiatan yang sudah lama (menu aktifitas ini bisa di link otomatis dari menu berita baru)
- 3) Menu Tentang Kami
 - a) Updating data Visi dan Misi PRKOM
 - b) Sub Menu Profil dihapus
 - c) Updating informasi pada sub menu Struktur Organisasi, dengan detail
 - Penambahan struktur organisasi PRKOM
 - Penambahan Profil Struktural PRKOM (Foto, nama, jabatan, riwayat hidup, dll) yang sebelumnya terdapat pada sub menu profil
 - d) Updating informasi pada sub menu Tugas dan Fungsi
 - e) Updating informasi pada sub menu Sumber Daya Manusia, dengan detail
 - Perubahan nama sub menu menjadi Daftar Pegawai
 - Sub Menu memberikan informasi pegawai PRKOM
 - Pengelompokkan berdasarkan bidang
 - Informasi pegawai terdiri dari : Nama Lengkap dan Bidang

- 4) Menu Publikasi
 - a) Perubahan nama menu, menjadi Hasil Riset dan Kajian
 - b) Sub Menu Full Paper; Oral; Poster; Artikel dihapus dan diubah menjadi Hasil Riset dan Kajian serta Policy Brief
 - c) Sub Menu Hasil Kajian dan Riset, dengan detail harapan hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - Control panel pada user Admin untuk input, edit, hapus Hasil Riset dan Kajian
 - Terdapat link unduh hasil riset dan kajian
 - Pengunjung dapat mengunduh hasil riset dan kajian, dengan ketentuan
 - Penambahan informasi jumlah pengunjung yang melakukan aktivitas unduh dan lihat infografis untuk masing-masing Hasil Riset dan Kajian pada control panel user Admin
- 5) Menu Reformasi Birokrasi
 - a) Updating informasi RB per periode waktu
 - b) Ditambahkan sub menu kegiatan yang terintegrasi dari sub menu berita baru terkait Reformasi Birokrasi
- 6) Menu Laporan
 - a) Sub Menu Laporan Kegiatan dihapus
 - b) Updating informasi pada sub menu lainnya
 - c) Penambahan sub menu berupa Rencana Strategis PRKOM dan Rencana Induk Riset
- 7) Menu Media
Perubahan nama sub menu dari vidio menjadi Video
- 8) Penambahan Menu Kontak Kami
Penambahan sub menu saran dan masukan terhadap SIR
- 9) Tampilan Web Panel User Bidang
 - a) Manajemen user role dalam pengelolaan data unit kerja PRKOM
 - b) Penambahan Menu : evaluasi pasca pelatihan, evaluasi narasumber, kumpulan notulen untuk upload data.
 - c) Penambahan menu Knowledge Sharing (contoh: materi training, seminar, workshop)
 - d) Terintegrasinya menu buku tamu dari akun admin
 - e) Penambahan menu QMS yang terintegrasi dengan akun bidang, sub menu QMS, terdiri dari:
 - SOP Makro
 - SOP Mikro
 - Mitigasi Risiko

- Rapat Tinjau Manajemen
- Manual Mutu

10) Tampilan Web Panel Admin

a) Penambahan Menu Tamu/ Buku Tamu Detail

- Field buku tamu dengan isian :
 - Hari / Tanggal
 - Jam
 - Nama
 - Instansi / Perusahaan
 - No. HP
 - Foto tamu
 - Keperluan
- Buku tamu dapat diakses user Security

b) Informasi Penambahan Kehadiran Pegawai Detail: i. Kelola Kehadiran Pegawai

- Menampilkan Kehadiran di layar TV seperti E-KIOS
- Penambahan menu QMS yang terintegrasi dengan akun bidang.
- Pembuatan Monev Realisasi terintegrasi dengan akun bidang.

c. Pengadaan Alat Pengolah Data

Seiring berjalannya waktu, beberapa sarana prasarana Pusat Riset Obat dan Makanan (PRKOM) memerlukan peremajaan dan pengadaan baru dikarenakan biaya perbaikan dan penggantian sparepart yang cukup mahal. Fasilitas perkantoran bertujuan agar operasional perkantoran dapat terselenggara dengan lancar dan meningkatkan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan perkantoran. Dan juga untuk Mendukung Kegiatan Riset dan Kajian Obat dan Makanan, oleh karena itu PRKOM melakukan Pengadaan Alat Pengolah Data. Adapun Pengadaan Alat Pengolah Data yang sebagai berikut

Tabel 12. Pengadaan Alat Pengolah Data

No	Nama Barang	Jumlah
1	PC	2
2	Printer	1
3	Scanner	2
4	Laptop	6
5	Printer Portable	1

8

SASARAN KEGIATAN 8 TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA 9
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
INDIKATOR KINERJA 10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian
Obat dan Makanan

Kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 8 dan Indikator Kinerja 9 dan 10 adalah :

a. Melakukan Revisi POK dan DIPA

Pada tahun 2020 PRKOM melakukan revisi terhadap dokumen DIPA sebanyak 4 kali dan Revisi Dokumen POK sebanyak 9 kali. Usaha melakukan revisi ini antara lain dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan dana, dalam rangka optimalisasi serapan anggaran, dan perubahan konsep kegiatan, serta revisi perbaikan akun dalam hal pencatatan keuangan.

b. Menetapkan Tim Pengelola Keuangan

PRKOM telah menetapkan tim pengelola keuangan pada tahun 2020. Tim pengelola keuangan ini meliputi: Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan Pengelola UAKPA/UAKPB, Petugas BMN dan Petugas SAKPA, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Mengikuti Workshop PIPK

Workshop PIPK diadakan pada tanggal 24- 28 September 2020. Workshop ini diselenggarakan oleh Inspektorat Utama BPOM. Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan penerapan PIPK dilingkup Badan POM. Workshop ini dibuka oleh Ibu Sekretariat Utama Badan POM Dra. Elin Herlina,Apt.,M.P. Dengan penerapan PIPK ini diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Penerapan PIPK akan dilakukan oleh setiap entitas akuntansi, dan entitas pelaporan. narasumber dalam acara tersebut adalah Raden Patrick Whyudiwisaksono, S.E., M.Ak., CPM, CIO. dan Ibu Januarti Tiurmaida serta Bapak Dedi Suharto dari Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan. Didalam acara tersebut unit kerja diminta untuk melakukan simulasi penyusunan laporan PIPK dengan pendampingan langsung dari Inspektorat Badan POM.

PENUTUP

Secara keseluruhan kegiatan riset dan kajian pada periode Januari-Desember 2020 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasil dari Kegiatan Riset dan Kajian tersebut merupakan bagian dari rencana strategis PRKOM yang meliputi: Kajian Peredaran Obat-Obat yang sering disalahgunakan, Pengukuran IKU BPOM 2020, Kajian Keamanan Pangan (INARAC), Survei Persepsi Lintas Sektor Terhadap Program Keamanan Pangan Nasional, Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan, Kajian Peningkatan Efektivitas Implementasi CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat Tradisional, Kajian Efektivitas Implementasi Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017.

Kegiatan di atas merupakan kontribusi yang diberikan oleh PRKOM sebagai salah satu unit kerja teknis di dalam organisasi BPOM. Penyempurnaan tugas dan fungsi akan terus dilakukan sejalan dengan Struktur Organisasi baru dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan termasuk capaian sasaran strategis level 2 PRKOM yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM.

Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2020 dan merupakan kegiatan riset dan kajian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan unit kerja di lingkungan BPOM. Diharapkan hasil Riset dan Kajian PRKOM dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan baik di Pusat maupun di Balai Besar /Balai POM. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil riset dan kajian, PRKOM perlu pengembangan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM.

Lampiran 1. Foto Fasilitas Perkantoran yang Diadakan Tahun 2020



Scanner



Microphone



Laptop Lenovo Thinkpad X13



Laptop Lenovo Thinkpad Yoga X1 Carbon Gen 5



Dispenser



Tripod



Handycam



Microphone



AC 1 PK



AC 2 PK



PC



Pointer



Standing Brecket



Printer



Pemotong Kertas



Printer Portable

Lampiran 2. Ringkasan Eksekutif Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan

RINGKASAN EKSEKUTIF RISET PEMAHAMAN PELAKU USAHA TERHADAP PROSES PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN DAN KEBERADAAN “BIRO JASA/CALO”

Pelayanan pendaftaran produk Obat dan Makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu layanan publik yang penting. Bagi pelaku usaha (PU), pendaftaran produk memiliki arti penting untuk meningkatkan daya saing dan bagi BPOM pendaftaran produk memiliki arti penting untuk pengawasan produk beredar. Salah satu unsur *tangibles* dalam pelayanan adalah mengupayakan agar proses berjalan lancar dan tepat waktu, karena waktu yang digunakan untuk pendaftaran berpengaruh terhadap bisnis produk tersebut. Pada tahun 2019, sesuai dengan *service level agreement* (SLA) yang dihitung berdasarkan prinsip *time to respond*, maka sebanyak 97,16% keputusan BPOM terhadap permohonan pendaftaran pangan olahan (PO) dapat diselesaikan tepat waktu. Capaian tersebut sangat baik, namun perlu dilihat lebih jauh terkait sering terjadinya permintaan tambahan data (TD) sehingga membuat proses pendaftaran lebih lama dari yang diharapkan oleh PU, meskipun masih sesuai dengan SLA.

Karena kecepatan dan keberhasilan pendaftaran dipengaruhi oleh tingkat pemahaman PU, maka penelitian ini bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pemahaman PU tentang pendaftaran PO; (b) menemukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemahaman PU; dan (c) menemukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap permasalahan TD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji keberadaan biro jasa/calor (BJ)¹ dalam proses pendaftaran. Untuk penelitian awal, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pendaftaran PO di Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO).

Penelitian dilakukan pada tahun 2020. Penelitian pemahaman PU dilakukan menggunakan *mix-method* dengan pendekatan teori *cognitive* dengan *Bloom's taxonomy*; sedangkan penelitian keberadaan BJ menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori *asymetri information*. Sumber data yang digunakan adalah data registrasi PO, data konsultasi registrasi PO (detil log), hasil pengisian kuesioner, hasil *focus group discussion* (FGDs), dan hasil *in-depth interview*. Responden dalam penelitian ini adalah PU yang mendaftarkan PO dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Calon responden dihubungi melalui *e-mail blast* kepada sekitar 5.000 alamat email yang terekam dalam aplikasi *e-registration* dan melalui informasi yang ditayangkan pada website BPOM, website Direktorat RPO, dan media sosial BPOM (Instagram, twitter).

¹ Biro Jasa atau calo (BJ) adalah orang atau perusahaan swasta yang merupakan *intermediary* yang mewakili perusahaan untuk melakukan pendaftaran produk di BPOM

Dari penyebaran kuesioner yang pada bulan Juli 2020, diperoleh sebanyak 1.008 kuesioner yang diisi lengkap oleh responden dan datanya dapat diolah.

Pengumpulan data kualitatif terkait pemahaman PU dilakukan melalui dua FGDs yang dilaksanakan secara terpisah, dimana FGD dengan PU dilaksanakan tersendiri, dan dengan instansi lain dilakukan tersendiri juga. Partisipan pada FGD selain PU, adalah Balai Besar/ Balai POM, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang berperan dalam registrasi PO di Indonesia. 20 peserta terlibat dalam FGD pertama, dipilih berdasarkan respon terhadap kuesioner, sementara 15 peserta pada FGD kedua, peserta berasal dari instansi terkait yang dipilih berdasarkan representasi wilayah yang memiliki banyak perusahaan PO, keberagaman Balai/Balai Besar, daerah yang memiliki layanan terpadu satu pintu/PTSP. FGD secara terpisah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan agar partisipan dapat memberikan informasi secara bebas tanpa tekanan dan rasa sungkan. Khusus untuk pengambilan data terkait BJ, digunakan jasa peneliti eksternal untuk menjaga objektivitas dan mengatasi resistensi dari subjek penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui berbagai teknik. Sebelum diolah data diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu. Demikian juga *tools* yang digunakan, terlebih dahulu diuji reliabilitas dan validitasnya. Data kuantitatif diolah menggunakan *statistic descriptive*, analisa korelasi *bivariate* dengan *pearson's correlation*, analisa kluster dengan *tree*, *principal component analysis* (PCA), dan analisa *multivariate* dengan *structural equation model* (SEM). Data dan analisis kualitatif disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Hasil riset terkait pemahaman PU mengidentifikasi ada 3 kluster PU dalam proses pendaftaran PO yaitu sebanyak 14% memiliki tingkat pemahaman tinggi dan keberhasilan tinggi, sebanyak 76% memiliki tingkat pemahaman sedang dan tingkat keberhasilan sedang-rendah, dan sebanyak 10% memiliki tingkat pemahaman rendah dan keberhasilan rendah. Perusahaan terbanyak berasal dari DKI Jakarta (20,5%), diikuti oleh Jawa Timur (17,0%), Jawa Barat (12,7%), Jawa Tengah (9,4%), dan Banten (7,7%). Kebanyakan PU berpendidikan S1 (61,90%), sisanya kurang dari S1 (26,29%) dan lebih tinggi dari S1 (11,81%). Mayoritas pendaftar (60%) memiliki latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan Obat dan Makanan, seperti ekonomi, akuntansi, dan hukum. Secara demografi, 64% pendaftar berstatus karyawan perusahaan, dan 33% adalah direktur/manajer/pemilik, sedangkan 3% merupakan konsultan.

Dari 9 (sembilan) jenis layanan pendaftaran yang diberikan oleh Direktorat RPO (registrasi untuk produk baru kategori risiko tinggi, registrasi untuk produk baru kategori risiko sedang, registrasi untuk produk baru kategori risiko rendah, registrasi untuk produk baru kategori risiko sangat rendah, registrasi ulang, registrasi untuk produk dengan perubahan minor, registrasi untuk produk dengan perubahan mayor, registrasi

untuk produk *single MD anak*², dan registrasi untuk produk program manajemen risiko (PMR)), yang paling banyak digunakan adalah layanan pendaftaran produk baru kategori risiko rendah (20,0%), diikuti oleh pendaftaran produk baru kategori risiko sedang (16,9%), dan pendaftaran produk dengan perubahan minor (15,9%). Tidak ada perbedaan yang berarti terkait keberhasilan pendaftaran di antara berbagai jenis layanan tersebut.

Penelitian mengidentifikasi faktor yang berpengaruh (*independent variables*) terhadap pemahaman PU, yaitu kapabilitas pendaftar (tingkat **pendidikan**, keterkaitan pendidikan dengan Obat dan Makanan, **pengalaman**, dan **minat** pada pekerjaan); MATERI yang perlu dipahami (**peraturan**, **persyaratan**, **prosedur**, **sistem** aplikasi, dan **produk**); PENDUKUNG (ketersediaan **informasi**, **dukungan perusahaan**, *regulatory assistance*). Sedangkan PEMAHAMAN adalah *dependent variable* yang dilihat dari **tingkat keberhasilan** dengan 3 indikator kunci yaitu **frekwensi TD**, **kecepatan menyelesaikan proses**, dan **penerimaan keputusan**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang secara signifikan membentuk tingkat pemahaman PU adalah kemudahan dalam memahami dan memenuhi MATERI terkait **persyaratan** (*loading factor*=0,88), **peraturan** (*loading factor*=0,86), dan **prosedur** (*loading factor*=0,68). Di antara **persyaratan** yang dinilai paling sulit dipahami dan dipenuhi adalah terkait *label* dan *certificate of analysis* (CoA). Kebanyakan

responden menyatakan bahwa *regulatory assistance* yang diberikan BPOM sangat membantu PU dalam proses pendaftaran. Selain *regulatory assistance*, hal yang juga dinilai mendukung proses pendaftaran adalah sistem aplikasi dan konsultasi *online*. Di sisi lain, hal-hal yang dinilai sebagai kendala dalam proses pendaftaran adalah permintaan TD yang sering terjadi sehingga memperlama proses pendaftaran; peraturan yang sering berubah; dan penjelasan petugas yang kadang-kadang tidak konsisten. Diluar proses registrasi itu sendiri, pemeriksaan sarana (PSB) yang merupakan prasyarat registrasi menjadi isu yang sangat sering muncul.

Hasil riset terkait keberadaan Biro Jasa (BJ) menunjukkan bahwa: (1) BJ eksis membantu PU dalam mengurus pendaftaran PO. (2) Pada umumnya BJ memiliki ijin sebagai Badan Usaha dengan bidang usaha yang beragam, salah satunya berbentuk *law firm*. (3) BJ menetapkan tarif resmi dan mengiklankan jasa secara terbuka melalui internet, media sosial, ataupun informasi dari mulut ke mulut. (4) BJ banyak dimanfaatkan oleh PU terutama perusahaan besar, atau yang tidak memiliki SDM khusus untuk pendaftaran produk. Alasan penggunaan BJ antara lain adalah karena dianggap lebih profesional, lebih hemat waktu, dan keberhasilan pendaftaran lebih terjamin

² Single MD Anak adalah kategori produk yang diproduksi oleh anak perusahaan dimana induk perusahaannya telah mendaftarkan produk yang sama

Dari hasil riset di atas, dapat disarankan kepada BPOM untuk meningkatkan layanan pendaftaran melalui beberapa aspek perbaikan, seperti **SDM, sistem aplikasi, peraturan/persyaratan dan prosedur**. Dengan memahami karakter PU yang beragam, maka perlu dipikirkan pendekatan yang berbeda untuk masing-masingnya. Perlu juga dipertimbangkan pemanfaatan klaster PU yang memiliki pemahaman tinggi dan tingkat keberhasilan tinggi untuk menjadi *model* atau percontohan. Sebaliknya klaster yang memiliki pemahaman rendah dan tingkat keberhasilan rendah juga perlu didekati dengan caratersendiri untuk mendorong peningkatan keberhasilan mereka.

Dari aspek SDM, disarankan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan pendaftaran terutama terkait teknik komunikasi (verbal dan tertulis) sehingga dapat memberi pemahaman kepada PU dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sosial budaya. Perlu juga secara berkala melakukan standarisasi (penyeragaman) pemahaman dan persepsi antara petugas untuk menghindari inkonsistensi keputusan. Evaluasi juga perlu dilakukan terkait beban kerja, lama kerja dan kemungkinan kejenuhan petugas layanan. Beban kerja yang tinggi dan terus menerus dapat meningkatkan kejenuhan, mengurangi ketelitian, dan menimbulkan inkonsistensi.

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDONESIA RISK ASSESSMENT CENTER (INARAC)
TAHUN 2020

Sejak tahun 2014, Indonesia telah memiliki forum Pengkaji Risiko Keamanan Pangan atau *Indonesia Risk Assessment Center* (INARAC) yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan tanggal 20 November 2014. Forum ini dibentuk untuk memfasilitasi *pool of expert* (kelompok pakar) di bidang kajian risiko keamanan pangan tingkat nasional, peningkatan kapasitas, serta berkomunikasi dengan pelaksana kajian risiko Kementerian/Lembaga. Hal ini sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pemerintah menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria berdasarkan analisis risiko. Manajemen INARAC berada dibawah koordinasi teknis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, BPOM dan diperkuat dengan SK No. HK.04.03.73.04.18.1462 tanggal 11 April 2018 dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, BPOM.

Pelaksanaan kajian risiko dilakukan oleh para pakar yang bergabung dalam Panel Pakar dan Komite Ilmiah INARAC dan berasal dari lintas Kementerian/Lembaga yang menangani keamanan pangan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KKP, Batan, BPOM dan Perguruan Tinggi, berdasarkan usulan topik kajian dari Manajer Risiko Kementerian/Lembaga.

Kajian Keamanan Pangan INARAC tahun 2020, meliputi:

1) Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Pangan Olahan Diet Khusus untuk Bayi dan Anak Di Indonesia

Kajian paparan 3-MCPDE dan GE dari Produk Pangan Olahan Diet Khusus (PDK) untuk kelompok bayi dan anak usia 0-36 bulan pada populasi di Indonesia dilakukan oleh panel pakar INARAC yaitu dari Kementerian Perdagangan, Balai Besar Industri Agro, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IPB dengan tujuan:

1. Mengetahui tingkat paparan 3-MCPDE dan GE pada Produk PDK untuk kelompok bayi dan anak (Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan MP-ASI) di Indonesia.
2. Mengetahui tingkat risiko kesehatan akibat paparan 3-MCPDE dan GE dari Produk PDK pada kelompok bayi dan anak di Indonesia;
3. Menyusun rekomendasi kebijakan

Tujuan pelaksanaan kajian risiko untuk mengetahui tingkat paparan senyawa kimia berbahaya pada produk pangan dan tingkat risiko kesehatan akibat paparan tersebut

pada populasi di Indonesia, sebagai dasar/bahan pertimbangan penyusunan kebijakan atau program keamanan pangan bagi manajer risiko baik di BPOM maupun di K/L terkait. Tahapan kajian meliputi identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, kajian paparan dan karakterisasi paparan (WHO, 2006).

Rekomendasi yang dihasilkan a.l.:

1. Data tingkat paparan dan karakterisasi risiko telah memadai dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh regulator yakni:
 - a. Program advokasi untuk industri Produk Formula dan MPASI terhadap *Code of Practices Codex*
 - b. Program monitoring/surveilan kandungan kontaminan 3-MCPDE dan GE Produk Formula dan MPASI
 - c. Program peningkatan mutu dan keamanan produk MPASI di Indonesia
2. Komunikasi risiko untuk hasil kajian risiko ini dapat dilakukan untuk semua pihak terkait (Akademisi, Pemerintah, Industri dan Masyarakat).
3. Publikasi ilmiah terhadap hasil kajian merupakan salah satu strategi untuk peningkatan citra unggul Produk Formula dan MP-ASI di Indonesia.
4. Laboratorium analisis kadar 3-MCPDE dan GE pada Produk Formula dan MP-ASI untuk stakeholder di Indonesia masih sangat terbatas. Program peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM untuk analisis kontaminan perlu diprioritaskan sebagai program nasional, mengingat kedua kontaminan ini ditemukan pada sebagian besar sampel.
5. *Code Of Practice For The Reduction Of 3-Monochloropropane-1,2-Diol Esters (3-Mcpdes) And Glycidyl Esters (Ges) In Refined Oils And Food Products Made With Refined Oils* (CXC 79-2019) untuk pemilihan dan penggunaan minyak nabati sebagai ingredien Produk Formula dan M-PASI dapat digunakan sebagai acuan penyusunan panduan/pedoman terkait di Indonesia, mengingat minyak nabati merupakan salah satu komposisi Produk Formula dan MP-ASI
6. European Regulation 2020/1322 dapat digunakan sebagai acuan penyusunan standar batas maksimum 3-MCPDE dan GE pada Produk Formula di Indonesia, mengingat sebagian besar Produk Formula untuk bayi dan anak usia 0–36 bulan memiliki konsentrasi 3-MCPDE dan GE di bawah batas maksimum regulasi Uni Eropa.

2) Kajian Profil Risiko Mikroplastik pada Air Minum Dalam Kemasan

Penyusunan profil risiko ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kombinasi risiko bahaya antara air minum dalam kemasan dengan mikroplastik yang ada di dalam air tersebut. Saat ini, baru sedikit penelitian di Indonesia tentang kontaminasi mikroplastik dalam air minum dalam kemasan (AMDK) yang telah dipublikasikan. Indonesia menghasilkan limbah plastik no 2 tertinggi di dunia, memiliki 1.145 produsen AMDK yang tersebar di seluruh Indonesia dan merupakan konsumen yang besar sekitar 26,2 milyar liter pada tahun 2016. Mikroplastik terbukti masih dapat ditemukan pada air yang telah melewati sistem pengolahan air dan air minum.

3) Penyusunan *Scientific Opinion* Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Minyak Sawit

Scientific opinion merupakan paper yang disusun berdasarkan kajian risiko tahun sebelumnya (tahun 2019), sehingga lebih ringkas (sekitar 20 halaman) daripada Laporan kajian risiko (sekitar 160 halaman). Penyusunan *scientific opinion* dilakukan bersama dengan Komite Ilmiah INARAC yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Balai Besar Industri Agro, Kementerian Pertanian, BATAN dan BPOM.


4) Penyusunan *Policy Brief* Kajian Risiko 3-MCPDE dan GE Produk Minyak Sawit

Policy Brief disusun bersama dengan Komite Ilmiah INARAC yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Balai Besar Industri Agro, Kementerian Pertanian, BATAN dan BPOM, berupa saran kebijakan yang lebih ringkas dibanding *Scientific Opinion* (sekitar 5 hal). *Policy Brief* ditujukan untuk pengambil kebijakan, yaitu para Manajer Risiko di BPOM maupun di Kementerian/Lembaga terkait

5) *Focus Group Discussion* dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kedeputusan III, P3OMN dan pakar dari IPB terkait persiapan kajian INARAC tahun 2021, yaitu Kajian Risiko Arsen anorganik pada (1) Ikan dan Produk Olahan Perikanan dan (2) Beras dan Produk Olahan Beras.

Topik ini merupakan usulan dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan justifikasi senyawa arsen anorganik lebih berbahaya terhadap kesehatan dibanding arsen organik yang telah diatur batasannya di regulasi. Selain itu beras serta produk olahan beras termasuk konsumsi utama masyarakat Indonesia dan produk Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) banyak dikonsumsi bayi dan anak di Indonesia.

Indonesia Risk Assessment Center juga mempunyai peran sebagai ***Focal Point ASEAN Risk Assessment Center (ARAC)*** di Indonesia dan pada tahun 2020 terlibat pada kegiatan:



1) Berpartisipasi pada 15th *ASEAN Senior Official Meetings on Health Development* (SOMHD) yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 24-27 Agustus 2020;

Kepala PRKOM sebagai salah satu narasumber dengan topik *Food Safety Risk Assessment in Indonesia Conduct by Indonesia Risk Assessment Center* pada kegiatan *ARAC Seminar "Risk Assessment On Food Contaminant In Asean"* yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 23 November 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

SURVEI PERSEPSI LINTAS SEKTOR TERHADAP PROGRAM KEAMANAN PANGAN NASIONAL

Kegiatan Survei Persepsi Lintas Sektor Terhadap Program Keamanan Pangan Nasional ini dilakukan untuk mengevaluasi sustainabilitas program keamanan yang diperlukan oleh suprasistem dengan cara mengukur persepsi efektifitas lintas sektor yang terlibat terhadap efektifitas intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan BPOM melalui program Desa Pangan Aman, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Program Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan BPOM tahun 2017-2019 dan yang belum diintervensi.

Tujuan dari kegiatan survei ini antara lain: 1) Mengetahui indeks persepsi lintas sektor terhadap efektifitas implementasi program keamanan pangan sebagai hasil intervensi yang dilakukan BPOM (Dit.PMPU dan Balai Besar/Balai/Loka POM) selama kurun waktu 2017-2019 dan lintas sektor yang belum diintervensi; 2) Memberikan rekomendasi terhadap pola intervensi yang perlu dilakukan Dit.PMPU BPOM dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi lintas sektor yang telah menerima intervensi BPOM maupun lintas sektor yang belum menerima intervensi. Pengukuran persepsi efektifitas lintas sektor tersebut dalam bentuk Indeks Efektivitas Lintas Sektor Program Keamanan Pangan. Definisi operasional Indeks Efektivitas Lintas Sektor Program Keamanan Pangan adalah sebuah ukuran terkait evaluasi efektivitas kemitraan BPOM secara periodik dengan para pemangku kepentingan lintas sektor dalam Program Keamanan Pangan yang dilakukan BPOM.

Penjelasan definisi operasional dari indeks dan turunannya sebagai berikut: 1) Efektivitas Lintas Sektor dilihat dari tiga Indeks Persepsi Efektivitas sesuai dengan Program Keamanan Pangan, yakni (a) Indeks Persepsi Efektivitas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, (b) Indeks Persepsi Efektivitas Desa Pangan Aman, dan (c) Indeks Persepsi Efektivitas Intervensi PJAS. Dimensi pembentuk indeks dibangun berdasarkan proses bisnis atau alur hubungan dan kerja sama BPOM dengan mitra lintas sektor dalam Program Keamanan Pangan dari masing-masing program adalah dimensi advokasi, dimensi implementasi dan dimensi evaluasi.

Jumlah data responden yang masuk dalam kegiatan survei ini sebanyak 2.822, dengan perincian responden berdasarkan regional waktu yaitu Indonesia Barat sebanyak 62,7%, Indonesia Tengah sebanyak 29,8% dan Indonesia Timur sebanyak 7,5%. Komposisi

responden terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah (8,5%), Provinsi Kalimantan Timur (8,3%), Provinsi DKI Jakarta (7,8%), dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (6,8%).

Komposisi responden masing-masing program Keamanan Pangan BPOM sebagai berikut: 1) Program Intervensi Keamanan PJAS sebanyak 59%; 2) Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sebanyak 24,8% dan 3) Program Desa Pangan Aman sebanyak 20,7%. Sedangkan responden sebanyak 15% merupakan responden yang belum terlibat/belum diintervensi oleh ketiga program keamanan pangan ini.

Indeks Persepsi Efektivitas untuk Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya untuk seluruh tahapan pelaksanaan program berada pada kategori efektif yaitu 83,05. Sedangkan nilai indeks untuk tahap advokasi sebesar 86,36, implementasi 84,65, dan evaluasi 82,32.

Indeks Persepsi Efektivitas untuk Program Desa Pangan Aman untuk seluruh tahapan pelaksanaan program berada pada kategori efektif yaitu 78,76. Sedangkan nilai indeks advokasi sebesar 86,46, implementasi 80,63, dan evaluasi 78,98.

Indeks Persepsi Efektivitas untuk Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk seluruh tahapan pelaksanaan program berada pada kategori efektif yaitu 85,08. Sedangkan nilai indeks advokasi sebesar 85,51, implementasi 85,33, dan evaluasi 86,31.

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder mapping* menunjukkan bahwa *stakeholder* yang termasuk pada kuadran IV (kategori *active consultation*) yaitu *stakeholder* dengan tingkat keterlibatan tinggi meskipun memiliki minat yang belum terlalu baik/tinggi. Pada kelompok ini *stakeholder* ini diperlukan pendekatan dan komunikasi yang aktif khususnya untuk mendengarkan pendapat mereka, khususnya pada isu-isu penting sehingga perlahan minat mereka dapat ditingkatkan. Kuadran ini dapat menjadi prioritas terlebih dahulu karena berpotensi untuk mengubah mereka menjadi *key player* sehingga kerjasama program lintas sektor akan menjadi semakin baik/efektif.

Prioritas untuk dilakukan perbaikan pola intervensi di seluruh program adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk masing-masing program, terdapat instansi lain yang juga termasuk pada kuadran IV ini, yaitu: a) Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya: Dinas/OPD yang mengkoordinir/mengelola pasar dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten/Kota; b) Program Desa Pangan Aman: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi, dan Bupati/Walikota. c) Program Intervensi Keamanan PJAS: BAPPEDA Provinsi.

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KEPATUHAN (*COMPLIANCE INDEX*)
PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai institusi pemerintah wajib mendorong para pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku serta mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha sehingga tercipta daya saing produk Obat dan Makanan yang dihasilkan. Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM level *stakeholder perspective* diukur oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan data sekunder dari hasil pengawasan yang telah dilakukan unit-unit terkait di lingkungan BPOM termasuk Balai Besar dan Balai/Loka POM.

Pengukuran IKPU bertujuan untuk (1) memperoleh data hasil pemeriksaan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM; (2) memperoleh indeks nasional kepatuhan pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap ketentuan; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan. Konsep dan metodologi pengukuran IKPU juga telah dikembangkan pada tahun ini, yaitu dengan kesepakatan definisi operasional *grading* dan kriteria patuh, dekomposisi *grading*, data iklan dan penandaan, serta penentuan bobot penimbang di masing-masing sarana.

Ruang lingkup pengukuran indeks adalah semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi, pelayanan Obat, iklan dan penandaan untuk komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha adalah hasil pengukuran secara agregat dari berbagai indikator pembentuk Indeks berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan *Good Manufacturing Practice* (GMP), distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan *Good Distribution Practice* (GDP), sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan, industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR), serta pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, ekspor, impor, atau pelayanan kefarmasian. Populasi pelaku usaha adalah seluruh pelaku usaha yang diawasi oleh BPOM dengan data pengawasan tahun 2019.

Setiap komoditi Obat dan Makanan mempunyai kekhasannya masing-masing dalam hal penentuan grading baik berdasarkan temuan maupun sanksi, sehingga tidak dapat dibuat grading yang sama. Selain itu masing-masing komoditi juga mempunyai bobot penimbang yang berbeda, salah satunya untuk mengakomodir jumlah pelaku usaha yang tidak sama per komoditi. **Bobot penimbang Obat dan Pangan Olahan** paling besar, yaitu 0,233 dan 0,230; disusul Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu 0,187; 0,178 dan 0,173. Hasil perhitungan bobot penimbang dengan *expert choices* untuk **sarana produksi** juga paling besar dibanding sarana lainnya untuk semua komoditi. Hal ini menunjukkan sarana produksi dianggap paling penting dalam menentukan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu suatu produk.

Total jumlah pelaku usaha yang diawasi berdasarkan *sampling* oleh BPOM, adalah sebanyak 43.578, dengan jumlah terbesar dari pelaku usaha di bidang Pangan Olahan 21.151, disusul di bidang Obat yaitu sebanyak 13.121. Pelaku usaha di bidang Kosmetik (6.193) lebih banyak dibanding di bidang Obat Tradisional (2.580), dan yang paling sedikit adalah di bidang Suplemen Kesehatan (713). Jumlah pelaku usaha yang semakin besar menunjukkan tantangan yang dihadapi BPOM juga lebih besar untuk mengawasi populasi yang besar.

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Nasional yang diperoleh tahun 2019 adalah **80,1**. Nilai ini lebih rendah dibanding **target** tahun 2020 yang terdapat di Renstra BPOM tahun 2020-2024, yaitu 82. Pada IKPU Nasional, komoditi Suplemen Kesehatan memiliki indeks yang paling tinggi, yaitu 94,51 (**Sangat baik**), disusul dengan Kosmetik (82,79), Obat (79,92) dan Pangan (77,77) dengan kriteria **Baik** dan Obat Tradisional (66,83) dengan kriteria **Cukup**. Nilai IKPU per propinsi dengan kriteria baik, terdapat **5 (lima) propinsi** tertinggi yaitu Sulawesi Utara (88,19), Lampung (84,04), Jawa Tengah (82,46), Jambi (82,30) dan Kalimantan Barat (80,21). Indeks ini tersusun atas agregat data hasil pengawasan di sarana produksi, distribusi, pelayanan farmasi, iklan dan penandaan untuk semua komoditi, sehingga analisis dilakukan terhadap masing-masing komoditi di setiap propinsi untuk memperoleh akar masalah.

Rekomendasi yang diberikan antara lain perlu adanya **strategi BPOM** untuk meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha agar memahami dan memenuhi ketentuan pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha dan *sampling* yang dilakukan oleh BB/Balai/Loka POM belum semuanya *random sampling*. **Langkah tindak lanjut kajian** ini diprioritaskan untuk pelaku usaha di bidang **Obat** yaitu (1) sarana layanan klinik, apotek dan toko obat; (2) di sarana distribusi PBF/IF dan (3) layanan RS dan Puskesmas. Pada pelaku usaha di bidang **Obat Tradisional** perlu perhatian khusus dalam hal pemahaman dan penerapan CPOTB, ketentuan perizinan, iklan dan penandaan. Pelaku usaha di bidang **Kosmetik** terutama di sarana distribusi produk tanpa

izin edar, kandungan bahan berbahaya dan kadaluarsa, sedangkan di bidang **Pangan Olahan** terutama di sarana produksi dan distribusi. **Rekomendasi** lainnya adalah integrasi metode ini di dalam Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) agar dapat diperoleh informasi secara *realtime* dan metode ini dapat digunakan sampai dengan tahun 2024 agar nilai indeks dapat dibandingkan per tahun.

RINGKASAN EKSEKUTIF
PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BPOM TAHUN 2020

Indeks kepuasan pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level Sasaran Strategis (SS3) yaitu meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Pengukuran indeks ini dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam berbagai bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Skala *Likert 1-4*. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Jumlah responden yang berpartisipasi tahun ini sebanyak 10.677 responden, meliputi 81 kegiatan pendampingan, 94 kegiatan desk, 101 kegiatan bimbingan teknis, dan 58 kegiatan sosialisasi dari semua komoditi. Jumlah unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan utama kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) tahun ini adalah 47, dan unit penyelenggaraan lainnya sebanyak 33. Dari 33 Balai Besar/Balai POM yang ada, tercatat yang paling banyak melakukan kegiatan KBP adalah BBPOM di Jakarta sebanyak 17, BBPOM di Semarang sebanyak 15, dan BBPOM di Palembang dan Pekanbaru sebanyak 11 KBP. Beberapa Balai Besar/Balai POM yang sangat minim melakukan KBP adalah BBPOM di Pontianak dan BPOM di Pangkal Pinang yaitu masing-masing 2. Jumlah kegiatan dan jumlah responden yang minim dari beberapa Balai Besar/Balai POM menjadi masukan untuk pendistribusian kegiatan yang lebih merata ke depannya, sehingga semakin merata pula kesempatan bagi pelaku usaha dari berbagai daerah mendapatkan layanan KBP dari BPPOM.

Sebaran responden terdiri dari laki-laki (30%), dan perempuan (70%), berstatus sebagai karyawan (70%), pemilik (22%), konsultan/perwakilan perusahaan dan asosiasi masing-masing 4%. Kebanyakan responden berasal dari bidang usaha produsen (60,7%), distributor (17,7%) dan importir (12,5%). Dilihat dari jenis komoditi, maka jumlah responden yang mengikuti KBP berturut-turut adalah di bidang Pangan Olahan (4.051), Obat (3.101), Kosmetik (2.715), Obat Tradisional (1.186), dan Suplemen

Kesehatan (1.135). Hal ini menunjukkan bahwa program pengawasan Pangan Olahan berhasil merangkul paling banyak pelaku usaha dalam kegiatan KBP, sebaliknya program pengawasan Suplemen Kesehatan merangkul paling sedikit pelaku usaha dalam kegiatan KBP. Beralihnya beberapa kegiatan luring menjadi daring pada masa pandemi covid-19 terbukti tidak menyurutkan keberlangsungan kegiatan KBP di unit penyelenggara tertentu. Hasil uji statistik dari kedua bentuk layanan membuktikan bahwa kepuasan pelaku usaha pada kedua jenis kegiatan tersebut hampir sama (tidak berbeda signifikan pada *level of confidence* 0.05).

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) per komoditi adalah 1) Obat 85,14; 2) Obat Tradisional 88,63; 3) Suplemen Kesehatan 87,55; 4) Kosmetik 85,21; dan 5) Pangan Olahan 87,29. Keseluruhan indeks komoditi membentuk Indeks Nasional yaitu 86,81. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaku usaha Obat dan Makanan sangat puas (rentang 76-100) terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM. Angka ini melebihi target tahun 2020 yaitu 82,00. Dari 5 aspek pengukuran, kepuasan tertinggi adalah pada aspek *assurance* (3,60) dan *empathy* (3,60). Kepuasan per unit penyelenggara sangat beragam, namun karena jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga beragam, maka dibentuk pemeringkatan dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut (jumlah kegiatan dan nilai kepuasan), sehingga diperoleh unit penyelenggara dengan peringkat tertinggi adalah BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Palembang. Untuk unit kerja di Pusat, peringkat tertinggi diperoleh oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan; Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru; dan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Unit penyelenggara dengan kegiatan yang sangat sedikit atau jumlah responden yang minim, meskipun nilai kepuasannya tinggi, tidak otomatis menunjukkan gambaran yang baik.

Survei ini juga berhasil menghimpun banyak saran dan masukan dari pelaku usaha (6.294). Aspek penyelenggaraan mendapatkan saran atau komentar terbanyak (38%) disusul oleh manfaat kegiatan (16%) dan sisanya terkait materi kegiatan, pelayanan petugas dan narasumber, sarana/fasilitas, usulan tema kegiatan berikutnya, dan lain-lain. Saran untuk penyelenggaraan utamanya menyangkut penyebaran undangan/informasi kegiatan yang diharapkan tidak mendadak; serta tentang kecukupan dan manajemen waktu penyelenggaraan KBP. Saran terkait manfaat kegiatan utamanya bersifat apresiatif terkait manfaat langsung dan tidak langsung dari KBP terhadap percepatan proses perizinan, serta mengharapkan KBP serupa diadakan secara berkala. Semua saran dan masukan ini akan sangat bermanfaat bagi unit penyelenggara untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan KBP.

Ke depan, direkomendasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan BPOM lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha, karena hal ini merupakan parameter yang berada di bawah nilai parameter lain, juga karena hal ini yang menjadi kepentingan utama pelaku usaha. Peran dan *awareness* PIC di setiap unit penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk membuat perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan mengisi kuesioner, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Penelitian lanjutan lainnya yang menggali persepsi petugas penyelenggara kegiatan KBP terhadap kegiatan yang mereka selenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Selain itu, pengukuran IKEPU di tahun berikutnya juga perlu memperbaharui pembobotan baik dari sisi komoditi maupun sisi jenis kegiatan. Hal ini untuk memperkuat justifikasi dan validitas pengukuran, mengingat pengukuran bobot penimbang per komoditi dilakukan sudah lama dan tidak spesifik ditujukan untuk pengukuran IKEPU; sementara bobot penimbang per jenis kegiatan untuk tahun ini ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti.

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PEREDARAN OBAT-OBAT YANG SERING DISALAHGUNAKAN

1. Latar Belakang

Penyalahgunaan obat di Indonesia cenderung meningkat di kalangan masyarakat usia produktif dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Adapun jenis-jenis obat yang disalahgunakan antara lain narkotika, psikotropika, dan obat keras golongan tertentu. Indikasi ini dapat terlihat dari jumlah perkara obat yang berhasil diungkap cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Jumlah perkara yang diungkap mayoritas adalah jenis Alprazolam, terutama di tahun 2019. Secara nilai ekonomis, nilai perkara obat ini cenderung meningkat. Bila pada periode Oktober 2017-April 2018 sekitar Rp.1,7 miliar, nilai tersebut meningkat menjadi Rp. 2,5 miliar di tahun 2019. Hal ini tentu saja mengancam tidak hanya kesehatan masyarakat namun juga aspek sosial bahkan ketahanan bangsa.

Dalam kajian ini, faktor risiko penyalahgunaan obat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, *supply*, dimana sumber obat tersebut berasal atau diperoleh. Sisi *supply* ditelusuri melalui berbagai jalur yang tersedia, baik legal maupun ilegal atau terjadi diversifikasi dan kebocoran obat, serta kemudahan perolehan obat tersebut. Kedua, *demand*, atau permintaan dan kebutuhan penggunaan obat tersebut, baik di tingkat institusi maupun masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keamanan obat dapat memicu timbulnya potensi penjualan obat secara ilegal. Indikasi ini dapat dilihat dari penjualan obat melalui *online* dan penjualan di apotek tanpa resep untuk obat keras. Bila ini dilakukan merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, masyarakat dengan tingkat disiplin yang rendah dalam memenuhi anjuran/peraturan pemerintah dalam pembelian dan pemakaian obat, akan meningkatkan peluang bagi penjual obat ilegal.

Data profil peredaran obat-obat yang sering disalahgunakan dan gambaran penyalahgunaannya amat diperlukan oleh BPOM. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan atau intervensi secara tepat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Indonesia, baik oleh BPOM bersama pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan berkelanjutan. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat mengetahui sejauh mana peran *stakeholder* BPOM dalam keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan obat yang terkait dengan penerapan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (POIPO).

2. Tujuan

Memperoleh profil atau gambaran peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan misoprostol di Indonesia. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah 1) Mengetahui pola importasi dan produksi psikotropika, Obat-Obatan Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT), dan misoprostol; 2) Mengetahui pola distribusi psikotropika, OOT, dan misoprostol pada sarana produksi dan distribusi; 3) Mengetahui pola penggunaan (peresepan) psikotropika, OOT dan misoprostol oleh tenaga Kesehatan; 4) Mengetahui tingkat dan faktor determinan penyimpangan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, OOT dan misoprostol.

3. Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method research*), yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dimana hasil kedua metode tersebut dianalisis dan diintegrasikan semua temuannya dan ditarik kesimpulan dengan saling menguatkan hasilnya (Tashakkori & Creswell, 2007). Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan 2 cara yaitu secara *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* dilakukan dengan menggunakan data distribusi dari sarana di tingkat paling atas ditelusuri ke jenjang di bawahnya melalui data laporan resmi yang dikirimkan dan dilaporkan secara rutin ke Kedeputan 1 oleh para distributor atau penyedia layanan obat. Sementara itu, pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan menelusuri jalur distribusi, yaitu menanyakan langsung data dari ke layanan pada tingkat yang paling bawah lalu dikonfirmasi secara berjenjang naik ke tingkat di atasnya. Sasaran responden kuantitatif adalah Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Instalasi Farmasi Provinsi, PBF dan Industri Farmasi, serta masyarakat umum. Studi dilaksanakan di 8 provinsi, yang terbagi atas 3 klaster provinsi dan di tiap klaster dipilih secara acak. Kategori penyalahguna tinggi: DKI Jakarta, Kalsel, Sulsel. Berkategori sedang: Sumsel, Kaltim, Sulut. Berkategori rendah: Bangka Belitung dan NTT. Di setiap provinsi dipilih 4 kab/kota secara acak, kecuali DKI Jakarta diambil seluruh 5 kotamadya.

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpimpin (DKT) yang dilakukan secara virtual. Wawancara mendalam dilakukan kepada 5 orang informan, yaitu Apoteker Penanggung Jawab PBF, Ikatan Dokter Indonesia, Ahli Market Riset Industri Farmasi, manager LSM, bidan dan pengguna psikotropika dan misoprostol. Selain itu, DKT dilaksanakan juga kepada asosiasi profesi POGI, IBI, IAI, IDI, PDSKJI, PERSI, dan perwakilan dari Unit Kedeputan 1 dan 4 BPOM, serta kalangan pengusaha seperti Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.

Ada beragam jenis psikotropika, OOT dan misoprostol, namun kajian ini difokuskan pada: Psikotropika: *Alprazolam*, *Dumolid*, *Calmler*, *Riklona*; OOT: Hexymer dan Arkine [ADC-

RHA]; Misoprostol: *Misoprostol generik, Gastrul, Prosomed, Neoprost, Mipros, Inflesco, Proster, Cytostol, Noprostol, Invitec, Misotab, Adlansis, Sopros, dan Cytotec*. Dalam laporan ini kami pisahkan temuan antara psikotropika, OOT dan misoprostol.

4. Psikotropika dan OOT

4.1 Peredaran dan distribusi obat

Jumlah obat golongan psikotropika dan OOT yang paling banyak diproduksi adalah alprazolam, hexymer, dan arkine. Hingga ke tingkat sarana pelayanan kefarmasian (rumah sakit, apotek, klinik, dan puskesmas), obat yang terbanyak dipakai juga alprazolam, kecuali pada PBF hexymer yang terbanyak. Pola berikutnya berfluktuasi antara arkine dan hexymer. Pada tingkat produksi, kedua terbanyak adalah hexymer, tetapi di tingkat layanan lebih banyak arkine kemudian hexymer, kecuali di puskesmas hexymer terbanyak. Dapat disimpulkan pola yang sama terjadi mulai dari jumlah yang diproduksi sampai yang didistribusikan pada tingkat sarana layanan farmasi, kecuali pada sarana PBF. Di PBF jumlah obat keluar lebih banyak daripada yang masuk, dan dapat mengindikasikan adanya diversi. Hasil kualitatif memperlihatkan ada banyak modus penyimpangan distribusi mulai dari PBF sampai sarana layanan kefarmasian: 1) kerjasama PBF/sub-PBF dengan apotek menggunakan sisa-sisa surat pemesanan (SP) yang sudah ditandatangani oleh apoteker; atau memang sengaja disiapkan, 2) *Sales/Medical Representative* (medrep) salah satu PBF mengejar tutup target, bekerjasama/memaksa pihak apotek membeli obat tertentu yang nantinya akan diambil oleh oknum tersebut, 3) Kerjasama dokter dengan apotek yang menjadi langganan para penyalahguna psikotropika, 4) Dokter bekerjasama dengan Klinik/Sarana layanan tertentu dengan menuliskan banyak resep psikotropika dengan tujuan memenuhi proses administrasi untuk prosedur legalitas sesuai Permenkes No.5/1997, 6) Praktek dokter bersama termasuk penyediaan apoteknya, yang berpotensi penyalahgunaan obat psikotropika dengan memperjualbelikan resep dokter.

4.2. Peresepan dan potensi penyimpangan di layanan

Dalam hal peresepan, hanya dokter spesialis yang meresepkan psikotropika, sebagian besar petugas kesehatan tidak meresepkan. Selain itu, Alprazolam, Hexymer, Arkine merupakan jenis yang paling banyak diresepkan. Psikotropika merupakan obat lini pertama bagi dokter spesialis kesehatan jiwa dan seringkali sulit didapat di pasar resmi karena kebijakan yang ketat. Apotek seringkali takut terjerat kasus psikotropika akibat ditunjuk oleh penyalahguna psikotropika yang tertangkap polisi. Hasil kualitatif mengungkap adanya potensi penyimpangan dengan cara: 1) Tanpa memberikan resep, hanya mengkomunikasikan ke apotek langganan/bekerjasama. 2) Dokter meresepkan 2 jenis obat yang zat aktifnya sama, berjenis obat generik dan paten. 3) Dokter memberikan

tarif ke pasien dalam satu paket termasuk obatnya, kewenangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

4.3. Penyalahgunaan obat

Alprazolam, trihexyphenidyl, xanax, dan hexymer banyak disebut informan kunci sebagai obat yang banyak beredar. Diduga terdapat 7 jenis psikotropika yang dijual dalam kemasan plastik tanpa izin edar. Diperkirakan 1 dari 13 orang pernah menggunakan psikotropika; dan separuhnya masih menggunakan dalam setahun terakhir, terutama alprazolam. Alasan terbanyak karena susah tidur, ingin tahu/coba-coba, atau menghilangkan stress/depresi.

4.4 Penjualan obat *online*

Penjual *online* psikotropika lebih tersembunyi karena terdapat peraturan yang mencantumkan ancaman hukumnya, sedangkan OOT lebih terbuka karena obat tersebut masuk dalam kategori obat keras, sehingga boleh diperjualbelikan jika ada resep dokter. Penjual psikotropika yang paling banyak beredar adalah di *marketplace*, dengan jenis obat terbanyak adalah hexymer, alprazolam, dan riklona. Lebih dari 75% akunnnya masih aktif, komunikasi penjual dan pembeli umumnya dilakukan melalui aplikasi *whatsapp*. Mayoritas penjual berlokasi di Jakarta, dan jasa pengiriman barang terbanyak dipilih JNE dan J&T.

5. Misoprostol

5.1 Peredaran dan distribusi obat

Pada produksi obat jadi misoprostol yang terbesar adalah misoprostol generik, invitec, gastrul, dan proster. Untuk tingkat distribusi hanya gastrul yang terdapat informasi lengkapnya. Di rumah sakit, apotek, dan klinik pola peredaran terbanyak adalah misoprostol, gastrul, invitec, dan proster. Dapat disimpulkan ada pola yang sama mulai dari jumlah yang diproduksi sampai distribusi pada tingkat sarana pelayanan farmasi. Selain dari PBF, apotek menjadi salah satu sumber perolehan misoprostol untuk sesama apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. 25% dari PBF kebanyakan menjual misoprostol generik dan proster. Pola penyimpangan yang terjadi relatif sama dengan psikotropika, namun penyimpangan misoprostol lebih dijual melalui jalur *online*.

5.2 Peresepan dan potensi penyimpangan obat di layanan

Hanya dokter spesialis yang meresepkan misoprostol sementara sebagian besar petugas kesehatan lainnya tidak. Misoprostol generik, gastrul, dan invitec paling banyak diresepkan. Ada perbedaan rata-rata jumlah obat yang diberikan antar profesi. Penggunaan Misoprostol untuk keperluan persalinan termasuk kedalam *off-label* yang menimbulkan kekhawatiran adanya jeratan hukum, meskipun telah direkomendasikan

WHO dan FIGO yang menyatakan bahwa obat tersebut menjadi bagian obat dari layanan maternal. Dari sisi profesi ada perbedaan perspektif antara POGI dan IBI. POGI merujuk pada rekomendasi WHO-FIGO dan dari sisi pelayanan lebih mudah dan efisien serta aman bagi pasien, sementara IBI melihat sisi kewenangan yang melanggar regulasi/SOP. Faktanya, mendapatkan obat ini sangat mudah karena banyak dijual *online* tanpa ada larangan/pembatasan. Berdasarkan informasi dari Direktorat Registrasi ONPP, sangat mungkin memasukkan penggunaan untuk keperluan persalinan dalam indikasi misoprostol jika ada usulan dari industri farmasi. Sebelumnya pernah dilakukan diskusi antara BPOM, Kemenkes, POGI, dan industri farmasi terkait hal ini, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari industri farmasi.

5.3 Penyalahgunaan obat

Gastrul, misoprostol generik, dan cytotec terbanyak beredar, bahkan diduga ada 2 jenis misoprostol dijual dalam kemasan plastik tanpa izin edar. Satu dari sebelas perempuan (15-49 tahun) pernah menggunakan misoprostol; dan sebanyak 50% masih menggunakan dalam setahun terakhir, dengan alasan pengobatan tukak lambung, keguguran, dan melancarkan haid.

5.4 Penjualan obat *online*

Penjual *online* misoprostol lebih terbuka/terang-terangan dan banyak ditemukan di media sosial dan *website* daripada *marketplace*. Hal ini disebabkan misoprostol masuk ke dalam kategori obat keras, sehingga diperbolehkan dijual bebas asalkan ada resep dokter. Para penjual umumnya menggunakan lebih dari 1 akun, lebih dari tiga perempat akunnnya masih aktif, dan pada pemain lama biasanya memiliki *website*. Cytotec, gastrul, dan inflesco menjadi yang terbanyak dijual *online*. Mayoritas lokasi penjual berada di DKI Jakarta dan Jawa Timur, dan jasa pengiriman terbanyak dipilih adalah J&T dan JNE.

6. Kesimpulan

Pola produksi pada golongan psikotropika dan OOT mengikuti permintaan yang tergambar pada penggunaan di jalur distribusi / pelayanan yang mencolok pada produk alprazolam, hexymer dan arkine. Begitupula pada obat-obatan misoprostol, dimana terdapat kesesuaian antara pola produksi dengan penggunaan di sarana pelayanan yang mencolok pada produk misoprostol generik, invitec, gastrul, dan proster. Potensi penyimpangan pada tingkat produksi untuk psikotropika dan OOT agak sulit terdeteksi, tetapi dari jumlah perbandingan bahan baku yang diimpor ada variasi yang lebar, semakin banyak yang diimpor potensi terjadinya penyimpangan semakin besar. Sementara pada produk obat-obatan misoprostol tidak terlihat adanya penyimpangan di tingkat produksi.

Pola distribusi psikotropika, OOT, dan produk misoprostol masih terlihat dikendalikan oleh PBF sebagai sarana distribusi resmi ke sarana pelayanan kesehatan. Namun potensi penyimpangan obat psikotropika, OOT, dan misoprostol, juga bermula dari tingkat distributor hingga retailer. Kecenderungan penyimpangan terlihat dengan adanya indikasi ketidaksesuaian antara jumlah obat yang diterima dengan jumlah yang dikeluarkan di tingkat distributor, dan masih terlihatnya modus penyimpangan yang melibatkan kerjasama dengan retailer/sarana pelayanan kesehatan.

Pola persepan produk psikotropika dan misoprostol cenderung sangat spesifik dilakukan oleh dokter spesialis jiwa dan dokter spesialis obsgyn terhadap pasien yang membutuhkan produk tersebut. Hal ini berbeda dengan produk OOT yang relatif lebih terbuka karena masih digolongkan sebagai obat keras. Khusus untuk misoprostol perbedaan pandangan terhadap potensi manfaat dan resiko penggunaan off label yang masih belum terselesaikan. BPOM dapat menyetujui status penggunaan misoprostol untuk keperluan persalinan, asalkan ada pengajuan dari pihak industri farmasi terkait perubahan indikasi.

Penyalahguna obat dapat memanfaatkan dua jalur untuk akses obat, baik secara legal dan ilegal. Penyalahgunaan memanfaatkan jalur legal dengan datang ke pelayanan kesehatan dengan berbagai modus. Penyalahgunaan memanfaatkan jalur ilegal sebagian besar dengan menggelapkan/memalsukan resep, melalui sindikat penyalahguna, maupun membeli secara *online*. Peredaran obat psikotropika, OOT, dan misoprostol semakin marak di jalur *online*. Penjualan misoprostol atau obat kategori OOT sangat terbuka dan mudah dikenali oleh masyarakat, sementara psikotropika lebih sulit ditemukan, penjualannya disamarkan karena ada regulasi dan hukuman yang jelas. Penjual juga melakukan promosi dan edukasi yang gencar ke berbagai medsos dan forum diskusi, termasuk dengan testimoni yang menyebabkan masyarakat semakin terpapar informasi yang salah. Kondisi ini mengakibatkan ada edukasi yang salah diterima oleh masyarakat, dan tentu ini membahayakan perempuan.

7. Rekomendasi

- ***Memperkuat jalur pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dan BPOM perlu menjadi champion.*** BPOM harus mengambil inisiatif untuk lebih aktif dengan melibatkan mulai dari industri farmasi, PBF, *retailer*, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, organisasi profesi/asosiasi, aparat penegak hukum serta Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan sistem E-Faktur.
- ***Melakukan review harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga (K/L).*** Produk obat melibatkan beberapa K/L yang masing-masing pihak memiliki regulasi tersendiri. Perlu dilihat kemungkinan adanya regulasi yang saling kontraproduktif

sehingga menjadi celah oknum untuk bermain di area tersebut tanpa tersentuh hukum. BPOM sebaiknya dapat mengoptimalkan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai contoh patroli siber oleh Kedeputan 4 harus mampu tidak hanya melakukan *takedown* pada produk namun juga menindak akun penjual. BPOM harus mampu menjadi *leader* dalam optimalisasi atas Inpres No.3/2017 tersebut.

- ***Memperkuat pengawasan dan penindakan.*** BPOM perlu berperan aktif mengajak dan melakukan dialog dengan organisasi profesi ataupun perhimpunan usaha agar secara tegas dapat memberikan sanksi bagi yang terbukti melanggar regulasi, selain memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum. Kelemahan dari sistem kita adalah dalam upaya penindakan yang mampu memberantas secara menyeluruh dan memberikan efek jera.
- ***Membentuk dan memperkuat tim pengawasan penjualan online dengan melibatkan lintas sektor terkait, termasuk perkuatan regulasi.*** BPOM perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, untuk penertiban, dan pengawasan atas maraknya peredaran psikotropika, OOT dan misoprostol di *online*. Bila perlu dibuat forum komunikasi tindak lanjut (TL) antara BPOM, Kemenkes, Kominfo dan Kemendag untuk TL penegakan hukum terhadap pemilik akun hingga pemilik *platform marketplace*. Misalnya, dibuat catatan pelanggaran untuk setiap akun yang terdeteksi dan diberikan batasan jumlah/jenis pelanggaran berat yang telah dilakukan untuk meningkatkan sanksi sampai rekomendasi *takedown* akun, serta mempidanakan pemilik akun tersebut. Tidak kalah penting, Kedeputan 1 dan 4 harus mampu memprakarsai pentingnya regulasi di tingkat nasional yang kuat terkait pengaturan penjualan obat secara online.
- ***Melakukan kerjasama dan pengawasan yang ketat dengan bea cukai dan kepolisian atas pembelian bahan baku obat impor yang dilakukan secara online.*** Saat ini pemesanan produk atau barang dapat dilakukan secara *online* di berbagai negara, termasuk bahan baku obat terlarang. Untuk itu, perlu kerjasama dan koordinasi untuk melakukan pengawasan dengan pihak bea cukai dan kepolisian dalam mengawasi barang-barang yang sifatnya impor atau yang diperjualbelikan melalui *online*, baik antar negara dan antar provinsi.
- ***Pemberian kuota produk.*** Mengingat obat termasuk produk yang sangat berisiko, maka Kedeputan 1 bersama Kemenkes perlu melakukan analisis besaran kebutuhan suatu produk sehingga dapat ditentukan besaran kuota, mulai dari jumlah bahan baku yang diimpor, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang didistribusikan. Dengan adanya informasi yang adekuat maka potensi penyimpangan dapat terkendali

termasuk pengendalian terhadap pola kerja marketing obat di semua level (produsen, distributor dan sarana pelayanan).

- ***Memperkecil selisih harga obat.*** Kedeputian 1 merekomendasikan Kemenkes untuk meninjau harga obat di pasaran. Adanya variasi tingkat profit yang tinggi antar produk akan mendorong terjadinya pemalsuan ataupun penyelundupan obat. Untuk itu, perlu dilakukan review ulang atas obat-obatan tertentu yang memiliki variasi harga yang lebar.
- ***Memperbaiki dan memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan yang dibangun.*** Kunci keberhasilan melakukan pemantauan peredaran dan distribusi obat adalah dengan memiliki data rutin yang akurat dan tepat waktu, mulai dari bahan baku, produksi, hingga distribusi yang terhubung dalam satu sistem terintegrasi. Kedeputian 1, Kedeputian 4 dan Pusdatin harus membangun sistem ini sehingga apabila sistem ini telah terbangun, hal yang perlu diperkuat adalah isu kualitas data dan kepatuhan pelaporan data dengan tepat waktu. Untuk itu, BPOM perlu memberikan sanksi bagi importir, Industri Farmasi, PBF, dan Saryanfar yang tidak memberikan data secara benar dan akurat, serta melihat kepatuhannya dalam melakukan pelaporan data dan harus konsisten.
- ***Memperkuat membangun data pada tingkat retailer.*** Sistem data yang terbangun di tingkat Kedeputian 1 berada pada tingkat industri farmasi dan PBF. Padahal tantangan terbesar dan gelapnya persoalan penyimpangan obat ada pada tingkat *retail* (Saryanfar) dan sistem data di kelompok ini belum terbangun optimal. Jika belum tersedia sistem pada tingkat *retail* (Saryanfar), maka BPOM perlu melakukan kerjasama dengan Ditjen Pajak untuk melakukan interoperabilitas data dengan sistem e-Faktur. Ke depan, BPOM diharapkan dapat membangun sistem untuk melengkapi kebutuhan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi peredaran obat-obat ini.
- ***Memperkuat tim analisis data rutin dan tim audit.*** Data rutin yang dilaporkan oleh Industri Farmasi dan PBF perlu dilakukan audit atas kebenarannya, termasuk melakukan tindak lanjut atas data tersebut. Hasil analisis kajian ini memperlihatkan analisis data belum optimal, karena ditemukan ada data yang perlu diverifikasi dan investigasi kepada pihak Industri Farmasi maupun PBF. Untuk itu, tim yang bertugas melakukan audit harus membuat semacam surat pemberitahuan kepada lingkungan internal BPOM dan atau K/L terkait serta aparat penegak hukum atas hasil kinerjanya secara berkala, yang berisi rekomendasi audit, peringatan, atau penindakan kepada sarana terkait.
- ***BPOM agar mendorong terjadinya dialog dengan pihak asosiasi/profesi dan industri farmasi*** untuk membahas berbagai isu terkait misoprostol agar dampak peredaran

yang saat ini marak terhadap masyarakat dapat diminimalisasi dan dapat digunakan sesuai indikasi medis sehingga tidak tersandung persoalan hukum nantinya.

- ***Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan dan akses obat yang benar dan aman.*** Dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat semakin sadar dunia digital. Faktanya banyak informasi yang salah atau berita hoax yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan bisnisnya. Hal ini mengakibatkan terjadi mispersepsi dan misinterpretasi di masyarakat atas obat. BPOM perlu meningkatkan dan memperkuat edukasi kepada masyarakat, baik secara daring ataupun melalui saluran komunikasi lainnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

SURVEI PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

Sebagai upaya menjamin Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, BPOM menetapkan Peta Strategis yang di dalamnya memuat Sasaran-Sasaran Strategis RENSTRA Badan POM tahun 2020-2024. Sasaran Strategis BPOM pada level 0. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana sistem pengawasan tersebut sudah efektif, maka ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur capaian indikator SS2 yaitu indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dan indikator SS3 yaitu indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Survei Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah dilakukan pada tahun 2020 ini oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM), survei ini bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia. Hasil survei ini akan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi unit-unit kedeputan dan Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

Desain metodologi survei ini menggunakan *Quantitative Research*, potong lintang (*cross-sectional*) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *margin of error* (MoE 10%) yaitu 11.570, yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Stratifikasi digunakan untuk menjaga *representative* sampel. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih *blok sensus secara PPS (Probability Proportional Size)* yaitu *sampling* dengan *size* jumlah

rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih *sebanyak 10 rumah tangga secara systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Penggumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penetapan responden berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) 11.570 yang terdiri dari jumlah kabupaten 450, jumlah kecamatan 1099, jumlah desa 1153 dan jumlah blok sensus 1157. Pencacahan dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi, tools kuesioner di-install di smartphone enumerator.

Analisis data dilakukan dengan skala likert dengan indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah pengetahuan, sikap dan perilaku. Sedangkan analisis pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan dengan indikator pembentuk indeks terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.

Interpretasi Indeks Kesadaran dan Indeks Kepuasan mengacu pada skala 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Kategori Indeks

Skor	Interpretasi
$\leq 45,00$	Tidak Baik
45,01 – 60,00	Kurang Baik
60.01 – 75,00	Cukup Baik
75.01 – 90,00	Baik
$\geq 90,01$	Sangat Baik

A. Hasil Survei Indeks Kesadaran

Hasil pengukuran Indeks Kesadaran (*Awareness Index*) Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan per Provinsi dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah

Tabel 2. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan

NO	PROVINSI	INDEKS KESADARAN
1	ACEH	71.75
2	SUMATERA UTARA	81.43
3	SUMATERA BARAT	81.14
4	RIAU	75.78
5	JAMBI	72.25
6	SUMATERA SELATAN	78.14
7	BENGKULU	83.80
8	LAMPUNG	82.75
9	KEP. BANGKA BELITUNG	76.73
10	KEPULAUAN RIAU	80.65
11	DKI JAKARTA	82.53
12	JAWA BARAT	67.35
13	JAWA TENGAH	71.91
14	DI YOGYAKARTA	76.68
15	JAWA TIMUR	73.23
16	BANTEN	87.33
17	BALI	69.54
18	NUSA TENGGARA BARAT	73.91
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68.41
20	KALIMANTAN BARAT	80.54
21	KALIMANTAN TENGAH	68.09
22	KALIMANTAN SELATAN	78.36
23	KALIMANTAN TIMUR	82.98
24	KALIMANTAN UTARA	79.14
25	SULAWESI UTARA	78.22
26	SULAWESI TENGAH	75.78
27	SULAWESI SELATAN	76.36
28	SULAWESI TENGGARA	72.60
29	GORONTALO	79.70
30	SULAWESI BARAT	64.86
31	MALUKU	74.80
32	MALUKU UTARA	71.18
33	PAPUA BARAT	80.30
34	PAPUA	60.85
	Grand Total	74.29

2) Indeks Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Obat dan Makanan per Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Indeks Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Obat dan Makanan

NO	PROVINSI	INDEKS TERHADAP OBAT DAN MAKANAN PER PROVINSI		
		INDEKS PENGETAHUAN	INDEKS SIKAP	INDEKS PERILAKU
1	ACEH	67.78	77.45	70.01
2	SUMATERA UTARA	78.74	87.72	77.83
3	SUMATERA BARAT	80.30	82.83	80.29
4	RIAU	66.72	76.95	83.67
5	JAMBI	66.87	81.14	68.73
6	SUMATERA SELATAN	83.62	78.59	72.20
7	BENGKULU	85.31	82.35	83.75
8	LAMPUNG	82.67	80.89	84.70
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	77.02	78.84	74.34
10	KEPULAUAN RIAU	81.57	78.00	82.39
11	DKI JAKARTA	83.38	84.87	79.35
12	JAWA BARAT	56.01	79.73	66.31
13	JAWA TENGAH	66.77	77.38	71.59
14	DI YOGYAKARTA	72.46	84.94	72.63
15	JAWA TIMUR	63.90	82.93	72.85
16	BANTEN	87.95	86.10	87.95
17	BALI	76.25	68.92	63.46
18	NUSA TENGGARA BARAT	67.12	83.68	70.91
19	NUSA TENGGARA TIMUR	60.70	78.27	66.27
20	KALIMANTAN BARAT	85.90	84.24	71.49
21	KALIMANTAN TENGAH	70.57	69.29	64.42
22	KALIMANTAN SELATAN	75.75	82.27	77.05
23	KALIMANTAN TIMUR	81.84	83.95	83.14
24	KALIMANTAN UTARA	72.56	81.59	83.27
25	SULAWESI UTARA	68.34	90.65	75.68
26	SULAWESI TENGAH	70.15	84.85	72.35
27	SULAWESI SELATAN	78.66	82.19	68.23
28	SULAWESI TENGGARA	69.54	75.65	72.61
29	GORONTALO	64.12	92.76	82.23
30	SULAWESI BARAT	54.51	71.16	68.90
31	MALUKU	65.93	82.22	76.25
32	MALUKU UTARA	79.81	70.87	62.87
33	PAPUA BARAT	73.52	83.08	84.29
34	PAPUA	52.12	71.59	58.84
	Grand Total	69.07	80.90	72.88

- 3) Indeks Kesadaran Masyarakat skala Nasional adalah **74.29 (Cukup Baik)**. Indeks Pengetahuan (**69.07 / Cukup Baik**), Sikap (**80.90**) / **Baik**) dan Perilaku (**72.88 / Cukup Baik**)
- 4) Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi skala Nasional, dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah

Tabel 4. Indeks Kesadaran Masyarakat per-Komoditi skala Nasional

No.	Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	79.08	Baik
2	Obat Tradisional	70.61	Cukup Baik
3	Suplemen Kesehatan	71.37	Cukup Baik
4	Kosmetik	71.09	Cukup Baik
5	Pangan Olahan	77.06	Baik
	Indeks Nasional	74.29	Cukup Baik

Catatan: Target Indeks Kesadaran tahun 2020 adalah 72

- 5) Indeks Kesadaran skala Nasional yang terdiri dari indeks pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap komoditi Obat dan Makanan, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku per Komoditi skala Nasional

NO	KOMODITI	INDEKS PENGETAHUAN	INDEKS TOTAL	INDEKS SIKAP	INDEKS TOTAL	INDEKS PERILAKU	INDEKS TOTAL
1	OBAT	76.89	69.07	83.49	80.90	76.86	72.88
2	OBAT TRADISIONAL	61.61		79.43		70.81	
3	SUPLEMEN KESEHATAN	63.26		79.37		71.48	
4	KOSMETIKA	63.45		79.09		70.75	
5	PANGAN OLAHAN	75.94		82.03		73.21	

- 6) Peringkat indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan skala Nasional: Indeks Terendah Kesadaran Masyarakat adalah **60.85 (Papua)** dan Tertinggi **87.33 (Banten)**. Indeks Kesadaran ini terdiri dari (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) yaitu:

- Indeks Pengetahuan Terendah adalah **52.12 (Papua)** dan Tertinggi **87.95 (Banten)**
- Indeks Sikap Terendah adalah **68.92 (Bali)** dan Tertinggi **92.76 (Gorontalo)**
- Indeks Perilaku Terendah adalah **58.84 (Papua)** dan Tertinggi **87.95 (Banten)**

B. Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat terhadap Obat dan Makanan

- 1) Umumnya masyarakat mengetahui bahwa Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan mempunyai petunjuk penyimpanan. Persentase terbesar untuk masyarakat yang mengetahui petunjuk penyimpanan yaitu pada produk Obat (85%), diikuti berturut-turut oleh Pangan Olahan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Dan Obat Tradisional.
- 2) Secara umum masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Dan Pangan Olahan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar. Sedangkan, persentase terbesar untuk yang mengetahui adanya produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar terdapat pada produk Pangan Olahan yaitu sebesar 48,5%, diikuti oleh Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.
- 3) Umumnya masyarakat mengetahui bahwa Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Dan Pangan Olahan mempunyai tanggal kedaluwarsa. Persentase terbesar untuk masyarakat yang mengetahui tanggal kedaluwarsa yaitu pada produk Obat (90%), diikuti Pangan Olahan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Obat Tradisional.
- 4) Sebanyak 59,8% masyarakat tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
- 5) Mayoritas masyarakat (68,2%) mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.
- 6) Persentase masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat hampir sama yaitu berturut-turut 43,7% dan 48,9%.
- 7) Dari seluruh responden yang disurvei, sekitar 90% responden menunjukkan sikap yang positif terhadap Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dari pendapat mereka yang menganggap penting kondisi kemasan produk, mengetahui efek samping produk, membaca petunjuk penggunaan, mengetahui petunjuk penyimpanan, produk harus terdaftar di BPOM, dan mengetahui tanggal kedaluwarsa produk, serta mengimplementasikannya dalam keseharian melalui perilaku.

C. Hasil Survei Indeks Kepuasan

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

a) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan per Provinsi dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah:

Tabel 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan per Provinsi

NO	PROVINSI	INDEKS KEPUASAN
1	ACEH	69.45
2	SUMATERA UTARA	70.90
3	SUMATERA BARAT	71.83
4	RIAU	62.37
5	JAMBI	68.83
6	SUMATERA SELATAN	74.24
7	BENGKULU	76.17
8	LAMPUNG	77.72
9	KEP. BANGKA BELITUNG	69.70
10	KEPULAUAN RIAU	68.68
11	DKI JAKARTA	73.30
12	JAWA BARAT	75.43
13	JAWA TENGAH	69.30
14	DI YOGYAKARTA	75.89
15	JAWA TIMUR	74.18
16	BANTEN	79.76
17	BALI	69.08
18	NUSA TENGGARA BARAT	74.98
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65.82
20	KALIMANTAN BARAT	65.76
21	KALIMANTAN TENGAH	61.00
22	KALIMANTAN SELATAN	76.11
23	KALIMANTAN TIMUR	70.20
24	KALIMANTAN UTARA	76.26
25	SULAWESI UTARA	81.16
26	SULAWESI TENGAH	65.08
27	SULAWESI SELATAN	73.94
28	SULAWESI TENGGARA	66.14
29	GORONTALO	62.70
30	SULAWESI BARAT	72.00
31	MALUKU	68.15
32	MALUKU UTARA	60.07
33	PAPUA BARAT	66.37
34	PAPUA	63.01
	Grand Total	72.54

b) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan skala Nasional adalah **72.54 (Cukup Baik)**.

c) Hasil Indeks Kepuasan per Komoditi skala Nasional dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah.

Tabel 7. Indeks Kepuasan per Komoditi skala Nasional

NO.	Produk	Indeks	Kategori
1	Obat	75.12	Baik
2	Obat Tradisional	70.50	Cukup Baik
3	Suplemen Kesehatan	71.13	Cukup Baik
4	Kosmetik	71.06	Cukup Baik
5	Pangan Olahan	73.81	Cukup Baik
	Indeks Nasional	72.54	Cukup Baik

Catatan Target Indeks Kepuasan tahun 2020 adalah 71

d) Peringkat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan skala Nasional yaitu : Indeks Terendah Kepuasan Masyarakat adalah **60.07 (Maluku Utara)** dan Tertinggi **81.16 (Sulawesi Utara)**

e) Di atas 70% masyarakat menyatakan puas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BPOM termasuk dalam hal pengawasan terhadap produk kedaluwarsa, berbahaya, dan jaminan keamanan produk obat dan makanan. Meskipun demikian, dari 70% tersebut hanya sepertiganya yang menyatakan sangat puas.

D. Hasil Indeks Kepuasan Langsung Masyarakat atas Layanan BPOM

a) Hasil Indeks Kepuasan Langsung Masyarakat Atas Layanan BPOM per Provinsi, dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah

Tabel 8. Indeks Kepuasan Langsung Layanan BPOM

NO	PROVINSI	INDEKS KEPUASAN LANGSUNG
1	ACEH	69.17
2	SUMATERA UTARA	67.15
3	SUMATERA BARAT	66.81
4	RIAU	64.51
5	JAMBI	69.06
6	SUMATERA SELATAN	75.03
7	BENGKULU	74.20
8	LAMPUNG	75.53
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68.00
10	KEPULAUAN RIAU	69.74

11	DKI JAKARTA	70.28
12	JAWA BARAT	75.52
13	JAWA TENGAH	69.25
14	DI YOGYAKARTA	72.46
15	JAWA TIMUR	75.46
16	BANTEN	73.39
17	BALI	74.12
18	NUSA TENGGARA BARAT	75.94
19	NUSA TENGGARA TIMUR	72.81
20	KALIMANTAN BARAT	72.87
21	KALIMANTAN TENGAH	69.35
22	KALIMANTAN SELATAN	75.09
23	KALIMANTAN TIMUR	70.13
24	KALIMANTAN UTARA	73.46
25	SULAWESI UTARA	75.28
26	SULAWESI TENGAH	66.50
27	SULAWESI SELATAN	73.54
28	SULAWESI TENGGARA	68.66
29	GORONTALO	71.07
30	SULAWESI BARAT	73.33
31	MALUKU	68.49
32	MALUKU UTARA	64.97
33	PAPUA BARAT	74.86
34	PAPUA	69.58
	Grand Total	72.89

b) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Langsung Atas Layanan BPOM skala Nasional adalah **72.89 (Cukup Baik)**

c) Peringkat Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Langsung BPOM skala Nasional yaitu: Indeks Terendah Kepuasan Langsung adalah **64.51 (Riau)** dan Tertinggi **75.94 (Nusa Tenggara Barat)**

Dari keseluruhan responden yang disurvei, hanya sebanyak 7,2% responden yang pernah mendengar/mengetahui tentang layanan HALO BPOM, dimana hanya sebanyak 16%-nya yang pernah menggunakan layanan HALO BPOM.

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CPOTB BERTAHAP TERHADAP
UMKM OBAT TRADISIONAL

Perkembangan konsumsi dan pasar obat tradisional yang diiringi dengan peningkatan jumlah industri dan usaha obat tradisional terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Produksi obat tradisional yang didominasi oleh UMKM Obat Tradisional diharapkan dapat membawa *multiplier effect* baik dalam pertumbuhan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir maupun dalam pembangunan kesehatan. Agar mampu berdaya saing dan meningkatkan kepercayaan konsumen, produsen UMKM Obat Tradisional dituntut menghasilkan produk yang terjamin dari aspek keamanan, mutu dan manfaatnya. Oleh karena itu, UMKM Obat Tradisional diwajibkan untuk melakukan produksi berdasarkan prinsip-prinsip CPOTB. Menyikapi isu strategis ini, BPOM mengeluarkan Kebijakan CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional yang tertuang dalam bentuk Buku Pedoman CPOTB dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Akan tetapi, berdasarkan data Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum memberikan dampak yang signifikan sehingga perlu dilakukan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut guna mengetahui area-area yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.

Penelitian kebijakan ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sequential explanatory*, dimana pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dan dianalisis, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian kuantitatif, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil analisis Tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan BPOM 26 tahun 2018, sebagai Kebijakan CPOTB Bertahap bagi UMKM OT terhadap Output Proses yaitu Tingkat Pemahaman UMKM OT terhadap Peraturan BPOM 26/2018, dapat dikatakan CUKUP BAIK, dimana aspek yang menunjukkan kurang efektif yakni Pemahaman Terhadap Persyaratan Sertifikasi.
2. Hasil analisis Tingkat Efektifitas Implementasi Kebijakan Peraturan BPOM 26 tahun 2018, sebagai Kebijakan CPOTB Bertahap bagi UMKM OT terhadap Proses

Pembuatan Obat Tradisional di UMKM OT adalah CUKUP EFEKTIF, pada semua Faktor INPUT- PROSES dan OUPUT.

3. Hasil Uji Persepsi Konsumen terhadap Kualitas Produk UMKM OT yang sudah melaksanakan Peraturan BPOM 26 tahun 2018 adalah BAIK (rerata di atas 4) pada semua Persepsi. Profil Pengguna obat tradisional adalah dominan laki-laki- muda (usia dibawah 40 tahun).

Berdasarkan penelitian kualitatif, telah dilakukan identifikasi permasalahan publik dan perumusan permasalahan publik. Berdasarkan identifikasi permasalahan diketahui bahwa “KURANG EFEKTIFNYA KEBIJAKAN” CPOTB dan akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan yang meliputi :

1. Masalah dan Kondisi Bahan Baku Produk UMKM
2. Masalah terkait Syarat Bangunan,Sarana dan Prasarana pada CPOTB
3. Masalah terkait Izin Kemasan/Label
4. Masalah dalam Proses Sertifikasi
5. Permasalahan dalam Pelaksanaan CPOTB
6. Masalah Komunikasi dengan BPOM/Staf
7. Masalah Koordinasi BPOM dan Instansi Lain
8. Masalah Kejelasan Kebijakan/Aturan
9. Masalah terkait Bimbingan Teknis /Pendampingan Online
10. Masalah Pelaksanaan CPOTB

Adalah adanya GAP dengan Sifat dan Karakter UMKM, dan juga adanya permasalahan pada Input Kebijakan seperti Kejelasan Aturan dan Konsistensi Penjelasan/Penerapanan Aturan.

Berdasarkan termuan penelitian yang telah dilakukan, dirumuskan Rekomendasi Kebijakan sebagai berikut :

a. Rekomendasi Terkait Perizinan (Izin Edar, Izin Kemasan, dsb)

Terkait proses perizinan untuk UMKM obat tradisional, direkomendasikan agar disederhanakan dan disesuaikan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri **dengan mengurangi persyaratan peraturan** untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Dalam Undang-Undang ini telah jelas disebutkan bahwa untuk UMKM hanya

diperlukan Satu Perizinan yang dikenal dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang didalamnya sudah mencakup Perizinan Usaha, Izin Edar, dan sebagainya. Dalam rekomendasi ini juga ditekankan sebaiknya tetap memperhatikan keseimbangan Perizinan Berbasis Risiko dan Peningkatan Daya Saing UMKM.

b. Rekomendasi Kriteria UMKM OT

Direkomendasikan agar Kementerian Kesehatan membuat Kriteria UMKM OT (yang diatur pada Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Hirarki Perundangan yang ada, yaitu: **(1) UMKM obat tradisional Mikro; (2) UMKM obat tradisional Kecil; (3) dengan tetap mempertimbangkan Pengelompokan berbasis Risiko Produk atau Analisis Berbasis Risiko.**

c. Rekomendasi Syarat Sertifikasi CPOTB

Berdasarkan Pengklasifikasian UMKM Di atas, maka untuk Persyaratan Sertifikasi CPOTB disesuaikan dengan Klasifikasi UMKM obat tradisional sesuai UU dan memperhatikan Risiko Produk. Sementara itu, khusus untuk Usaha Menengah, persyarat dalam Sertifikasi CPOTB diharapkan sudah tidak bertahap akan tetapi sudah memenuhi seluruh Aspek CPOTB Tahap II, ini juga termasuk hal yang sama untuk:

- Rekomendasi CPOTB Bertahap – Aspek Hygiene Perorangan
- Rekomendasi CPOTB Bertahap – Aspek Sanitasi Bangunan Dan Fasilitas
- Rekomendasi CPOTB Bertahap – Aspek Sanitasi Peralatan

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
INSTRUKSI PRESIDEN NO.3 TAHUN 2017

Implementasi Inpres No.3/2017 perihal peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, telah berjalan selama 3 tahun namun masih banyak ditemukan permasalahan terkait pengawasan dan peredaran Obat dan Makanan. Untuk itu dipandang perlu dilakukan kajian efektivitas implementasi kebijakan dimaksud khususnya yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan POM dalam pelaksanaan di pusat maupun daerah agar dapat diketahui faktor-faktor dan permasalahan apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasinya, sehingga dapat dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan sebagai penyempurnaan Inpres No.3/2017 tersebut.

Penelitian kebijakan ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu penggabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sequential explanatory*, dimana pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dan dianalisis, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian kuantitatif, diperoleh hasil sebagai berikut:

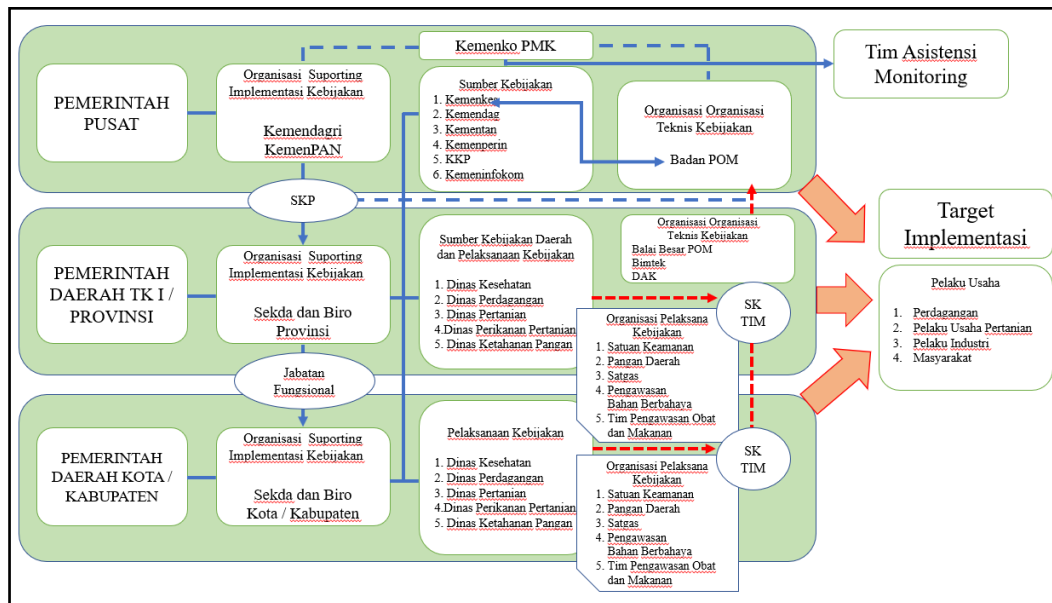
1. Hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas implementasi Inpres No.3/2017 terkait tugas dan fungsi Badan POM, diketahui bahwa nilai rasio efektivitasnya adalah efektif. *Score* dan Bobot tertinggi yang diperoleh adalah pelaksanaan sinergi dalam menyusun dan penyempurnaan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan, termasuk didalamnya Inisiatif untuk membuat SK Turunan sedangkan pengembangan sistem pengawasan Obat dan Makanan dalam hal ini pengembangan SMART BPOM untuk sinergi pengawasan Obat dan Makanan di daerah dinilai masih kurang efektif.
2. Hasil analisis tingkat efektivitas kebijakan dari keseluruhan faktor Implementasi Kebijakan implementasi Inpres No.3/2017, nilai Rasio Efektivitasnya adalah cukup efektif. Nilai Efektivitas tertinggi adalah pada Efektivitas Sumber Kebijakan dan Efektivitas Disposisi sedangkan faktor yang kurang efektif adalah faktor Birokrasi dan Komunikasi Kebijakan

3. Hasil analisis kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas Implementasi Inpres No.3/2017 terkait tugas dan fungsi Badan POM menunjukkan bahwa permasalahan pertama pada sumber daya pengawasan, kemudian masalah pada sumber kebijakan di daerah, masalah koordinasi/ sinergitas keseluruhan Tugas dan Fungsi pengawasan Obat dan Makanan serta permasalahan kepemimpinan organisasi pengawasan (*Leading Sector*) tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu terdapat permasalahan efektivitas pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan permasalahan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian sanksi atas pelanggaran keamanan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dirumuskan Rekomendasi Kebijakan sebagai Berikut:

- a. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengawasan** meliputi peningkatan kualitas SDM Pengawasan melalui Pelatihan Teknis/ Sertifikasi oleh Badan POM untuk Pegawai Pemda TK I/ II, peningkatan koordinasi Badan POM dengan Pemda TK I dan TK II terkait dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan POM dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi fungsi dan tugasnya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, penyusunan pedoman RKPD dan APBD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi kesempatan BPOM untuk mengintervensi terkait pengawasan Obat dan Makanan agar menjadi bagian dari RKPD dan APBD masing-masing daerah.
- b. **Penguatan Sumber Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan** meliputi Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi juga untuk terus dilakukan Badan POM kepada Kemendagri dalam hal ini dengan melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan Sosialisasi ke masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan dapat melakukan kerjasama yang intens dengan Dinas Kominfo di daerah.
- c. **Penguatan Koordinasi (Spasial dan Horizontal)** meliputi Koordinasi dalam ROKORPUSDA secara rutin di daerah; Adanya Tim Monitoring dan Asistensi Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat Pusat; Adanya Sinergitas Kebijakan Operasional Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemda Provinsi /Kota dan Kabupaten, didorong kepada bentuk yang lebih operasional; Peningkatan Kerjasama (SKB atau MoU) dengan Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian); Pembuatan SOP dan Juknis untuk Pemda TK I dan TK II yang dapat menjadi acuan untuk pengawasan Obat dan Makanan; Pembuatan Petunjuk Teknis untuk Internal BPOM berupa Juknis atau SOP untuk Balai POM terkait mekanisme berkoordinasi dengan Pemda TK I dan TK II.

d. Model Penguatan Fungsi BPOM di Daerah dan Penguatan Peningkatan Fungsi BPOM dan K/ L di Daerah



e. Mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Komunitas

Perlu dibangun suatu Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis Komunitas/Partisipasi Masyarakat, Pengembangan model koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memberi masukan dan mengawal Implementasi Kebijakan; Pengembangan model komunikasi interaktif; Pengembangan model komunikasi untuk menjaring peran serta masyarakat dengan menggunakan berbagai media yang tersedia (media cetak dan elektronik) serta cara yang berbeda (survey, *forum group discussion*, konsultasi, dan sebagainya); BPOM agar meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kominfo setempat dan mengusulkan Dinas Kominfo menjadi bagian sebagai ROKORPUSDA yang melakukan koordinasi secara rutin di daerah.

f. Reformasi Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan

Peluang untuk Reformasi Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019, perihal Keamanan Pangan, yang didalamnya mengatur tentang Pengawasan. PP 86/2019 telah lebih jelas mengatur tugas dan fungsi pengawasan Pangan, termasuk mengatur dan menetapkan *leading sector* pengawasan pangan serta tata kelola pengawassan pangan sesuai siklus bisnisnya.



 (021) 42887351

 riset.om@pom.go.id

 Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat

 www.riset.pom.go.id